



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA  
(DOMESTIC VIOLENCE)**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Untuk Menyelesaikan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

**DWIKARI NURISTININGSIH, SH**

NIM: B 4 A 001027

PEMBIMBING UTAMA:

**PROF.DR.BARDA NAWAWI ARIEF,S.H**

PEMBIMBING PEMBANTU:

**DR. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH, M.H**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**2003**

**UPT-PUSTAK UNDIP**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA  
(DOMESTIC VIOLENCE)**

Disusun Oleh:

**DWIKARI NURISTININGSIH**

**B4A001027**

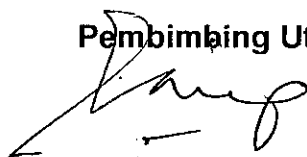
Dipertahankan didepan Dewan penguji

Pada tanggal : 9-6-2003

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

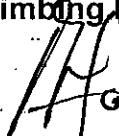
Magister Ilmu Hukum

**Pembimbing Utama:**



**PROF.DR.BARDA NAWAWI ARIEF,SH**

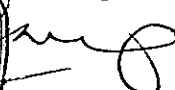
**Pembimbing Pembantu:**



**DR.NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH.M.H**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**



**PROF.DR.BARDA NAWAWI ARIEF, SH**

**TESIS INI DIPERSEMBAHKAN PADA:**

-Universitas Diponegoro, almamater tercinta

-Suami dan anak-anakku yang terkasih

-Bapak dan Ibu yang tercinta

-serta Kakak dan adik-adik yang tercinta

## KATA PENGANTAR

Perkenankanlah pada kesempatan pertama dan utama ini, penulis mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada **Allah Swt, atas rahmat dan hidayahNYA**, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir, di bidang studi Ilmu Hukum pada program kajian sistem peradilan pidana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul : **"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*)"**, banyak sekali pihak-pihak yang telah membantu, memberikan dorongan moril, materiil dan doa kepada penulis. Tanpa bantuan dan kepedulian mereka, penulis menyadari tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam kesempatan ini ijinlah penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, SH**, selaku pembimbing utama dalam penulisan Tesis ini dan sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Diponegoro. Beliau selaku Dosen Pembimbing, dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, dan tuntunan yang sangat berharga bagi kelancaran penulisan tesis ini. Di samping itu

beliau berkenan memberikan bahan-bahan atau materi yang sangat mendukung bagi penulisan tesis . Sekali lagi penulis haturkan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada Beliau.

2. **Dr.Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.M.H**, selaku pembimbing pembantu dalam penulisan tesis ini. Beliau selaku pembimbing juga dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya dalam membimbing penulis selama penulisan tesis ini. Sekali lagi penulis haturkan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada Beliau.
3. **Prof.Ronny Hanitijo Soemitro, SH**, yang telah memberikan bahan kuliah mengenai Metodologi Penelitian Hukum. Pada Beliau penulis haturkan terima kasih.
4. **Eko Soponyono, SH.M.H**, yang telah memberikan masukan pada waktu review proposal, juga telah membantu penulis dalam memandu Seminar Hasil Penelitian. Pada Beliau penulis haturkan terima kasih.
5. **Paulus Hadisuprpto, SH.M.H**, yang telah memberikan masukan pada waktu review proposal, pada Beliau penulis haturkan terima kasih.
6. **Budhiarto, SH.MS** selaku Sekretaris Program S2 beserta **seluruh Staff Administrasi** yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada **Bapak dan Ibu penulis**, yang telah memberikan doa restunya, sehingga penulis dapat

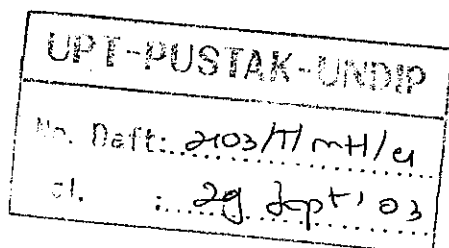
menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada kakak dan adik-adik penulis dan keluarga besar penulis yang telah membantu dan memberikan semangat untuk terselesainya tesis ini.

Secara khusus ucapan terima kasih ini disampaikan pada **Ir.Akhmad Nezar, Deva dan Dina** (Suami dan anak-anak yang terkasih) yang tidak hentinya-hentinya memberikan doa dan dorongan moril demi berhasilnya penulisan tesis ini. Terimalah persembahan tesis ini sebagai ungkapan rasa sayang dan kebersamaan kita bersama Amien.

Akhir kata penulis berharap agar tesis dengan segala kekurangannya, sekecil apapun dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

Semarang, April 2003

Dwikari Nuristiningsih



## DAFTAR SINGKATAN

KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
RUU-KUHP	= Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU	= Undang-undang
KUHAP	= Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KDRT	= Kekerasan Dalam Rumah Tangga
HAM	= Hak Azasi Manusia
RPK	= Ruang Perawatan Khusus
PBB	= Perserikatan Bangsa-bangsa
KTP	= Kekerasan Terhadap Perempuan

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Kerangka Konseptual.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	21
E. Kegunaan Penelitian.....	21



F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	26
 BAB.II. TINJAUAN PUSTAKA .....	28
A. Pengertian Kekerasan .....	28
B. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga ( <i>Domestic Violence</i> ).....	42
C. Ruang Lingkup Dan Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga ( <i>Domestic Violence</i> )...	49
D. Tinjauan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga ( <i>Domestic Violence</i> ) Dalam Berbagai Perspektif.....	55
E. Tinjauan Terhadap Korban Tindak Kekerasan.....	68
F. Pemahaman Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	79
 BAB.III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	86
A. Kebijakan Hukum Pidana saat ini dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah Tangga ( <i>domestic violence</i> ).....	86
A.1.Contoh-contoh kasus tindak kekerasan terhadap Perempuan dalam rumah tangga ( <i>domestic violence</i> )....	86

A.2. Analisis terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ( <i>domestic violence</i> ).....	90
A.3. Respon hukum terhadap masalah <i>Domestic Violence</i> ....	99
B. Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ( <i>domestic violence</i> ) di masa mendatang.....	111
B.1. Pengaturan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( <i>domestic violence</i> ) Dalam Konsep KUHP .....	111
B.2. Gambaran Kebijakan Hukum Pidana di berbagai Negara Asing .....	115
B.3. Konsep Dasar Yang Harus Diperhatikan Dalam Kebijakan Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana.....	135
B.3.1. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumus kan perbuatan atau tindak pidana dan perlindungan hukum.....	135
B.3.2. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan sanksi pidana .....	138
B.4. Beberapa Gagasan pemikiran yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ( <i>domestic violence</i> ).....	140

BAB.IV. PENUTUP.....	151
A. Kesimpulan .....	151
B. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	

## ABSTRAK

Tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang terjadi dalam lingkup domestik/ rumah tangga/ keluarga atau yang sering disebut *domestic violence* merupakan suatu tindak kejahatan yang merampas hak-hak asasi perempuan. Namun selama ini tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) tidak dikenal dalam hukum positif (KUHP), sehingga seandainya terjadi suatu kasus, maka sebagai landasan atau acuan untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan menerapkan atau mengoperasionalkan Pasal 356 KUHP (Penganiayaan secara umum).

Penelitian ini bersifat normatif, sehingga lebih menitik beratkan pada data sekunder. Data sekunder yang digunakan dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang didapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 356 KHUP tersebut tidak sesuai (terdapat berbagai kelemahan-kelemahan), sehingga perempuan sebagai korban tidak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) di masa mendatang yang menyangkut masalah perbuatan atau tindak pidana, sanksi dan perlindungan hukum.

Dalam membuat kebijakan pembaharuan hukum pidana perlu memperhatikan kelemahan yang ada pada perundang-undangan saat ini dengan membandingkannya dengan Konsep KUHP, KUHP/ peraturan negara asing dan juga konvensi internasional yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan.

## ABSTRACT

Violence against women especially against in family life that is well known as domestic violence is a crime women's rights. So far, on women in household (domestic violence) however is not recognized in positive law (Criminal Code), so that if a case happens, as ground or reference to solve the case is by applying or operating the article 356 of Criminal Code (concerning the oppression or violence in general).

This research was normative, so it emphasized on secondary data. The secondary data employed were collected from primary, secondary and tertiary law resources. The result of this research obtained would be analyzed by using analyzed qualitative method.

The result of research suggested that the application of article 356 of the Criminal Code was not consistent (there were many drawbacks), thus, the women as victims could not get the law protection. Therefore, it required the criminal law policy in order to overcome the violence against women in household (domestic violence) in the future concerning the case of action or criminal action, sanction and protection for victims.

In order to establish the policy of criminal law reform was necessary to consider the existing drawbacks of present law by comparing to the concept of KUHP (Criminal Code), the foreign criminal codes and even international regarding the violence against the women.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semenjak Kartini melakukan gerakan emansipasi wanita, puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, sebenarnya kekerasan terhadap perempuan sudah berlangsung. Ketika gerakan emansipasi bergulir secara pelan-pelan melalui jembatan waktu dan titian zaman, sampai-sampai gerakan emansipasi itu sendiri menjadi kurang populer dan cenderung terlupakan, ternyata perlakuan kekerasan terhadap kaum perempuan masih tetap saja berlangsung hingga sekarang.

Kasus-kasus pelanggaran hak buruh perempuan, perdagangan perempuan, kekerasan dalam keluarga hampir setiap hari dapat ditemui dalam berita media masa baik cetak maupun elektronik. Terjadinya kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa negara telah gagal mengambil langkah-langkah yang efektif untuk melindungi warganya dari kekerasan.

Kejahatan atau kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari tindak kejahatan pada umumnya, ternyata sampai sekarang masih menyimpan problem-problem yang laten. Sudah bukan rahasia lagi bahwa angka statistik kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan

tidak menunjukkan angka yang sebenarnya.<sup>1</sup> Hal ini tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala psikis, kultur, sosial dan lain-lain, disamping masalah yang menyangkut hukum pidana materiel maupun hukum acaranya yang cenderung menempatkan perempuan sebagai korban tindak kekerasan pada posisi yang lemah. Banyak kasus yang menempatkan perempuan sebagai korban tetapi sulit diteruskan ke pengadilan hanya karena KUHP belum atau tidak mengaturnya.

Tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai isu global dapat dengan nyata dilihat dari ditetapkan sejumlah instrumen internasional sehubungan dengan fenomena ini antara lain:

- a. *Viena Declaration and Programme of Action (1993)*
- b. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)*
- c. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993)*
- d. *Beijing Declaration and Platform for Action (1995)*

Dari sejumlah instrumen internasional tersebut, maka sebenarnya persamaan hak antara pria dan wanita di Indonesia secara *de jure* bukan masalah lagi, sebab hal ini telah diperkuat dengan diratifikasinya Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap

---

<sup>1</sup> . Sugiharto Rekso Pertomo, *Mengupayakan Ganti Rugi Korban dan Perlindungan Saksi (usulan perubahan konkret SPP dari Perspektif Kejaksaan dan Penuntut Umum)*, dalam Chatarina Puramdani Hariti (ed), *Perubahan Dalam SPP untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan, 2000.h.25

wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dengan Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1984.

Selain itu, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah memberikan perhatian terhadap masalah kekerasan (*Violence*) ini sejak tahun 1985. Misalnya dalam konggres PBB tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", yang dilanjutkan pada tahun 1990 dengan tema yang sama. Dalam kedua konggres tersebut telah disepakati tentang sub topik *Domestic Violence*, yang diartikan *domestic violence* oleh PBB adalah kekerasan yang diarahkan kepada istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai obyek perlakuan.<sup>2</sup>

Pada tanggal 10-17 April Tahun 2000, diadakan Workshop tentang "*Woman in The Criminal Justice System*", dalam konggres PBB tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", bahwa:

*The present paper presents four modules for discussion in the workshop on women in the criminal justice system, each dealing with a different aspect of the situation of women vis-à-vis criminal justice systems within the framework of transnational organized crime :*

- (a). *Women as offenders and prisoners;*
- (b). *Women as victims and survivors;*
- (c). *Women in the criminal justice system; and*
- (d). *Research and policy issues.*<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> . Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum*, dalam T.O.Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni Bandung, 2000.h.253.

<sup>3</sup> . Internet, WWW United Nations.



Menurut laporan Bank dunia tahun 1994, bentuk kekerasan terhadap perempuan terbanyak adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim dan mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol. Dimana pelaku berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penganiayaan secara fisik, emosi, seksual, ekonomi, dan sosial.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri belum ada data resmi yang menyebutkan berapa jumlah korban *domestic violence* karena pada dasarnya istilah kekerasan dalam keluarga/rumah tangga/*domestic violence* itu sendiri tidak dikenal baik dalam tatanan kaidah hukum Indonesia maupun dalam tatanan bahasa Indonesia. Istilah *domestic violence* berasal dari bahasa asing/inggris dan diterjemahkan secara bebas sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tidak ada, yang ada hanya perselisihan antara suami-istri, anak atau anggota keluarga lainnya. Dalam setiap rumah tangga diakui tentu ada perselisihan, akan tetapi yang menjadi masalah, apakah penyelesaian perselisihan itu menggunakan cara-cara kekerasan atautkah tanpa kekerasan.

---

<sup>4</sup> . Jurnal, *Perempuan Menuntut Keadilan*, Mitra Perempuan, Jakarta, 2000.h.29.

Definisi tindak kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993).

Pasal 1 dari Deklarasi, menyatakan :

Kekerasan terhadap perempuan adalah "setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>5</sup>

Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga di mana biasanya yang berjenis kelamin laki-laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri), memang mungkin saja yang teraniaya adalah laki-laki di dalam rumah tangga tetapi beberapa kasus menunjukkan bahwa hampir semua kasus kekerasan domestik dialami perempuan, terbukti lewat luka-luka yang diderita para istri, bila ada dua kasus laki-laki yang teraniaya itu biasanya disebabkan oleh bela diri dari pihak perempuan.<sup>6</sup>

Seorang perempuan mengalami kekerasan dalam kehidupan rumah tangganya dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacar, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau

---

<sup>5</sup> . Lampiran 2, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993*, Op-cit.h.387

<sup>6</sup> . Gelles dan Cornel (1990), dalam *Jurnal Perempuan* Vol.01, Bulan Agustus/September 1996.h.4.

seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak. Kekerasan domestik juga dikenal sebagai pemukulan istri, istri diserang, istri disiksa, pasangan disiksa, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga.

Dalam KUHP saat ini , sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan dapat dijamin dengan pasal-pasal kejahatan, namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan seperti kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain). Tindak pidana ini dirumuskan dalam pengertian sempit (terbatas sekali) meskipun ada pemberatan pidana (sanksi hukuman) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga seperti terhadap ibu, istri, anak. Sedangkan Perbuatan yang termasuk sebagai kekerasan domestik secara khusus belum diatur dalam KUHP , sehingga kejahatan tersebut juga belum banyak terungkap di pengadilan maupun dalam data statistik kriminal kepolisian. Meskipun kejahatan ini terjadi di banyak tempat, tetapi kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat dan terasing dari intervensi dunia luar, karena nilai patriarki yang mewarnai sikap dan kultur kehidupan kebanyakan keluarga di Indonesia. Masalah kekerasan domestik ini jarang sampai ke pengadilan, diantaranya disebabkan oleh sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak kekerasan terhadap perempuan yang juga

didasarkan pada persepsi bahwa masalah dalam keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri tanpa melibatkan mekanisme pengendalian sosial secara informal, yakni dalam lingkungan sekitar juga tidak kondusif untuk mendukung perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan viktimisasi terhadap dirinya kepada aparat.

Kondisi lain yang perlu diperhatikan bagi situasi perempuan di Indonesia adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan rasa malu, *self guilty*, dan rasa *respect* pada keyakinan pentingnya menjaga nama baik dan keutuhan keluarga. Faktor-faktor ini akan lebih nampak nyata pada ruang lingkup keluarga yang *center sosial life* nya masih ketat bersendikan pada tradisi dan adat istiadat.<sup>7</sup> Akibatnya gerakan tutup mulut ini membuat kekerasan yang dilakukan orang-orang terdekat seakan-akan mendapat pembenaran. Sikap masyarakat yang mengabaikan kekerasan dalam rumah tangga sangat merugikan perempuan sebagai korban. Pertama korban merasa dipersalahkan atas kekerasan yang menimpanya, maka korban akan diam karena takut atau khawatir dipersalahkan telah membuka aib keluarga. Korban akan "enggan" melaporkan kejahatan ini baik kepada keluarga terdekat apalagi kepada pihak kepolisian. Tak heran jika jenis kekerasan ini jarang terungkap dan walaupun diungkap paling banyak hanya sampai

---

<sup>7</sup> . Sri Sanituti Haridadi, *Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita Dalam Keluarga*, dalam T.O.Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Jakarta, 1995.h.511.

pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya, kekerasan dalam rumah tangga sering disebut sebagai *the hidden crime*. Di samping itu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) sifatnya mirip dengan delik kesusilaan yaitu tergolong delik yang sifatnya sebagai delik aduan. Hal ini berarti bahwa aparat tidak dapat bertindak apabila tidak ada laporan dari korban, padahal kebanyakan korban tidak memberikan laporan pada pihak berwajib disebabkan oleh berbagai alasan seperti hubungan keluarga yang dekat. Akan tetapi *domestic violence* ini tidak bisa dibiarkan karena dari ke hari kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga atau keluarga terus berlangsung, disamping itu pada dasarnya *domestic violence* merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) yang tidak dapat ditolerir lagi, karena mengancam kebebasan manusia untuk hidup tenang jauh dari segala ancaman.<sup>8</sup>

Kekerasan terhadap wanita seringkali tidak dianggap masalah besar karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah ketiadaan statistik yang akurat. Alasan kedua menganggap bahwa kekerasan tersebut (*sexual*) adalah masalah tempat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah (*sanctity of the home*). Alasan ketiga, berkaitan dengan keterkaitan budaya seperti telah diuraikan di atas

---

<sup>8</sup>. Pasal 3, Pernyataan Umum Tentang Hak-hak Asasi Manusia.

(*cultural sovereignty*) dan keempat karena ketakutan terhadap suami. Seringkali faktor-faktor tersebut terpadu satu sama lain.<sup>9</sup>

Akan tetapi harus disadari juga bahwasanya hukum positif belum dapat mengatasi masalah *domestic violence* ini. Ada sedikit kelegaan dan kebanggaan tersendiri bahwa Organisasi Wanita dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengusulkan Rancangan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*).

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka dalam rangka menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yaitu kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*Penal Law reform*) yaitu kebijakan untuk merumuskan peraturan pada Undang-undang hukum pidana yang tepat dalam rangka menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) pada masa yang akan datang. Dan sejak awal timbulnya gerakan-gerakan untuk memperjuangkan perbaikan kondisi yang dihadapi wanita, para pemerhati masalah perempuan berpendirian bahwa pembaharuan hukum merupakan suatu alat yang maha penting dalam upaya

---

<sup>9</sup> . Muladi, *Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan*, dalam *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, 1996, h.36.

perbaikan yang perlu diselenggarakan sehingga perempuan akan menikmati perlakuan yang adil nantinya.

## **B. Permasalahan**

Bertolak dari asumsi yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka pada hakekatnya terdapat dua permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini, dalam ruang lingkup kebijakan hukum pidana yang menyangkut masalah:

- a. Perbuatan atau tindak pidana;
- b. Sanksi pidana; dan
- c. Perlindungan korban.

Adapun dua permasalahan pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana saat ini dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) ?

Dalam KHUPidana tidak atau belum ada pasal yang mengatur secara khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, demikian juga dengan istilah delik kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*), sehingga secara otomatis masalah perbuatan atau tindak pidana, sanksi dan perlindungan korban tidak ada. Kebijakan selama ini yang dipakai sebagai aturan untuk menyelesaikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah Pasal 351 dan 356 KUHP.

2. Bagaimana sebaiknya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) di masa mendatang ?

Berdasarkan permasalahan dari nomor:1 di atas, dimana kebijakan hukum pidana saat ini belum atau tidak mengatur masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*), maka secara otomatis tidak bisa memberikan perlindungan dan solusi hukum yang tepat, oleh karena itu diharapkan kebijakan hukum pidana di masa mendatang dapat mengatur/ mengakomodir delik kekerasan tersebut, baik dari segi rumusan perbuatan atau tindak pidana, sanksi, dan perlindungan korban. Untuk menentukan atau membuat kebijakan ketiga hal tersebut harus memperhatikan atau mengacu kepada ketentuan selama ini dengan melihat kekurangannya kemudian membandingkannya dengan konvensi internasional/kebijakan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) di negara asing, yang belum diatur dalam perundang-undangan saat ini . Dengan demikian maka yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah perumusan perbuatan atau tindak pidana, sanksi, dan perlindungan korban pada tahap formulatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan pidana di masa mendatang .



### C. Kerangka Konseptual

Meningkatnya intensitas diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara seberang, tetapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizen* makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan yang menciptakan korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan seksual, teror) maupun ekonomis (di PHK).<sup>10</sup>

Indonesia adalah suatu masyarakat patriarkhal, dan kondisi faktual ini tidak dapat dipungkiri, seperti juga di negara-negara lain di dunia. Patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas di mana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan dipersepsi sebagai struktur yang menderegasi perempuan, yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Misalnya kecenderungan untuk membayar upah buruh perempuan di bawah upah buruh laki-laki dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat laki-laki.

---

<sup>10</sup> . Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, Makalah, Internet. [WWW.Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan](http://WWW.TindakKekerasanTerhadapPerempuan.org).

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus-menerus bagi perempuan di manapun di dunia. Walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan, akan tetapi harus diingat bahwasannya kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu ancaman bagi kaum perempuan. Terlebih lagi rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia, tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, akan tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi.

Bukan itu saja, karena jika dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami perempuan, baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami oleh laki-laki. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya misalnya keluarga sendiri (ayah, paman, suami, pacar), orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya (atasannya atau teman kerja). Tindak kekerasan terhadap

perempuan terjadi secara universal di semua budaya dan negara, dari 90 negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga (*family violence*), dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan.<sup>11</sup>

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak azasi yang paling kejam terhadap perempuan. Tak salah jika tindakan ini disebut oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan, tindakan kekerasan ini antara lain mencakup pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, serta ingkar janji.

Masalah kekerasan terhadap wanita saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Banyak istilah yang digunakan seperti : *violence against woman, gender based violence, gender violence, female-focused violence, domestic violence* dan sebagainya. Disebut masalah global karena terkait disini issue global tentang hak-hak azasi manusia (HAM). Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> . Ibid.h.2.

<sup>12</sup> .Muladi, *Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, 1997.h.129.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan perempuan di hadapan laki-laki bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam pandangan para feminis, kekerasan terhadap perempuan membuktikan adanya struktur kekuasaan yang terlalu menguntungkan laki-laki. Kekuasaan yang demikian telah merajalela di segala bidang, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya.<sup>13</sup>

Studi tradisional tentang kejahatan akan mencari jawabannya pada batasan tentang kejahatan kekerasan terutama di dalam Undang-undang pidana, di samping batasan sosial. Selanjutnya dengan menggunakan batasan undang-undang tersebut, masalah kejahatan kekerasan dibicarakan antara lain mengenai :

- bentuk-bentuknya, perkembangan dan penyebarannya, dengan mencarinya melalui data statistik kriminal.
- Sebab-sebabnya (etiologi kriminal) dengan mencarinya pada ciri-ciri pelaku (termasuk korbannya) seperti ciri-ciri biologis, sosial, dan psikisnya.<sup>14</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kekerasan berarti 1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan

---

<sup>13</sup>. Barwardono dalam Suharman, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Refleksi Ketimpangan Kekuasaan Regim Kehidupan yang laki-laki-lakian*, Ibid, h.38.

<sup>14</sup>. IS. Susanto, *Kajian Kriminologi dan Kekerasan Terhadap Wanita*, Ibid, h.114.

kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.<sup>15</sup> Sedangkan dalam *World Conference* yang diadakan pada tahun 1995 di Beijing, butir 13 memberikan definisi kekerasan terhadap perempuan, yang jika disadur bebas berbunyi:

“setiap tindak kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap wanita, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi dalam kehidupan ,masyarakat atau pribadi”<sup>16</sup>

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut. Perilaku yang tidak diharapkan ini dapat berbentuk kekerasan fisik maupun non fisik. Bisa berupa sentuhan, pelukan, ciuman ataupun paksaan seksual baik melalui penetrasi pada alat kelamin, anus ataupun mulut dengan menggunakan obyek. Bisa pula berupa ejekan secara verbal atau meremehkan keberadaan perempuan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993.h.131.

<sup>16</sup> . Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dari segi kriminologi dan Hukum)*. Makalah Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP, 1998.

<sup>17</sup> . Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, dalam Achie Sudiarta Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni Jakarta, 2000.h.116.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan memberikan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>18</sup>

Sementara itu Pasal 2 Deklarasi tersebut membagi kekerasan terhadap perempuan, meskipun tidak membatasinya ke dalam tiga kelompok yaitu :

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi
2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara di manapun terjadinya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> . Lampiran 2, Loc-cit.h.387.

<sup>19</sup> . Budi Sampurna, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, Op-cit.h.52.

Berbicara mengenai tindak kekerasan, maka disini terkait apa yang dinamakan dengan "korban", adapun yang dimaksud dengan korban dalam Resolusi MU PBB 40/34 dinyatakan bahwa orang-orang baik, secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pengertian korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional. Selanjutnya dikemukakan, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban<sup>20</sup>. Sekiranya cukup layak pengertian korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Pendapat lain mengatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari

---

<sup>20</sup> . Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya , Bandung, 1998.h.54.

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka di sini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>21</sup>

Judul Tesis ini menekankan pada masalah Kebijakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan berarti, 1. Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan; 2. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (ttg. pemerintah, organisasi dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan<sup>22</sup>. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" Belanda). Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.h.63.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1997.h.131.

<sup>23</sup> Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.h.27.



Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.<sup>24</sup>

Dengan demikian kebijakan hukum pidana disini, adalah bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Arti perempuan adalah 1. Orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui; 2. istri, bini. Sedang wanita adalah perempuan dewasa, kaum putri.<sup>25</sup>

Pada tesis ini penulis menggunakan istilah perempuan dengan pertimbangan dalam Tap MPR No:IV/MPR/1999 tentang GBHN memakai istilah tersebut. Selain itu dalam pemerintahan, dipakai nama

---

<sup>24</sup> . Ibid.h.28.

<sup>25</sup> . Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op-cit.h.670 dan 1125.

Departemen pemberdayaan perempuan. Dalam KUHP Moeljatno dipakai istilah wanita, namun KUHP R.Sugandhi dipakai istilah perempuan. Menurut penulis pada dasarnya tidak ada perbedaan makna antara kata perempuan dan wanita, karena semuanya adalah terjemahan dari *woman*.<sup>26</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas , maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana saat ini dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*).
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) di masa yang akan datang .

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan atau pembentuk Undang-undang dalam pembuatan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan yang berupa sumbangan pemikiran dalam menentukan arah kebijakan

---

<sup>26</sup> . Yeni Widowati, *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan*, Tesis, UNDIP, Semarang, 2002.h.24.

yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Disamping itu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Pada tesis ini penulis memfokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum, yaitu pada hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*) merupakan penelitian yang bersifat "*Normatif*". Dengan demikian titik tolak kajian menggunakan pendekatan yang bersifat *yuridis normatif*. Hal ini dapat dilakukan dengan mengungkapkan ketentuan yuridis mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam KUHP yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu juga dengan pendekatan *yuridis komparatif dan empiris*.

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi : (1). Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2). Penelitian terhadap sistematik hukum; (3). Penelitian terhadap taraf

sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal; (4). Perbandingan hukum; dan (5). Sejarah hukum.<sup>27</sup>

Pada penelitian ini pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama. Pendekatan yuridis komparatif diperlukan untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan hukum yang digunakan dalam tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Pendekatan komparatif dimaksudkan sebagai penunjang dari pendekatan yuridis yang dapat dilakukan dengan membandingkan dengan KUHP asing, konvensi internasional tentang perempuan dan dengan Konsep KUHP. Pendekatan empiris dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan di Rifka Anisa Woman Crisis Center Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>28</sup>. Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang kebijakan hukum pidana dalam tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) baik dalam hukum positif selama ini dan juga dari pelaksanaan di lapangan yaitu putusan-putusan pengadilan.

---

<sup>27</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.h.14.

<sup>28</sup>. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 1986, h.10.

### 3. Sumber Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka menitikberatkan pada data sekunder.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut:

- 1). Bahan-bahan hukum primer, merupakan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari :
  - a). Garis-garis Besar Haluan Negara
  - b). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c). Yurisprudensi yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan
- 2). Bahan-bahan sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:
  - a). Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP)
  - b). Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.
  - c). Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan
  - d). Hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tesis
  - e). Hasil-hasil pertemuan ilmiah seperti, seminar, diskusi, deklarasi internasional dan sebagainya yang berkaitan dengan judul tesis

3). Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Inggris-Indonesia.

#### 4. Teknik pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanitijo Sumitro, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan penggunaan daftar pertanyaan (*kuesioner*)<sup>29</sup>. Pada tesis ini teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara.

Studi pustaka oleh Sanapiah Faisal disebut sebagai sumber data non manusia, dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen-dokumen resmi yang mendukung obyek penelitian.<sup>30</sup>

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode *analisis normatif-kualitatif*.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1994.h.51.

Pada Bab Satu seperti tersaji pada halaman depan.

Sedangkan Bab Kedua berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian kekerasan, pengertian kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*), ruang lingkup dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), tinjauan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dari berbagai perspektif, tinjauan terhadap korban tindak kekerasan, pemahaman tentang kebijakan hukum pidana.

Pada Bab Ketiga berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 (dua) bagian. Bagian A menguraikan tentang kebijakan hukum pidana saat ini dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) berisi tentang contoh-contoh kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*), analisis terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) respon hukum terhadap masalah *domestic violence*. Sedangkan bagian B menguraikan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) di masa mendatang berisi tentang pengaturan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dalam Konsep KUHP, gambaran kebijakan hukum pidana di berbagai negara

---

<sup>30</sup>. Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990.h.81

asing , konsep dasar yang harus diperhatikan dalam kebijakan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dengan hukum pidana, beberapa gagasan pemikiran yang berkait dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Pada Bab keempat penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kekerasan

Apabila membahas mengenai kekerasan, maka yang pertama ada di benak adalah bahwa kekerasan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan. Dengan demikian untuk mendapatkan pengertian atau definisi kekerasan, maka akan lebih jelas kalau dikemukakan lebih dahulu mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan.

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan sebagai demikian oleh penguasa dan dapat dikenakan sanksi pidana (*punishble*). Penetapan dapat dikenakannya sesuatu perbuatan sanksi pidana, yang berarti pula secara implisit merupakan penetapan perbuatan itu sebagai kejahatan, dilakukan oleh penguasa.<sup>1</sup>

Menurut Saparinah Sadli sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Selanjutnya Saparinah juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat

---

<sup>1</sup> . Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986.h.107.

menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.<sup>2</sup>, malahan menurut Benedict S Alper merupakan *the oldest social problem*.<sup>3</sup>

Kata Kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-sehari adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan sebagainya yang dilakukan oleh manusia<sup>4</sup>. Susilo berpendapat bahwa pengertian kejahatan dapat dilihat secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Sedangkan pengertian secara sosiologis selain itu, kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang toh pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis

---

<sup>2</sup>. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, h.11.

<sup>3</sup>. Ibid, h.11.

<sup>4</sup>. R.Susilo, *Kriminologi*, Politea, Bogor, 1985, h.11

menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama<sup>5</sup>.

Pendapat ini senada dengan Kartini Kartono yang mengatakan bahwa kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemausiaan (immoral), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.. Ringkasnya, secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk lingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan pengertian atau definisi tentang kejahatan. Perbuatan-perbuatan pidana

---

<sup>5</sup> . Ibid,h.13.

<sup>6</sup> . Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, CV.Rajawali, Jakarta, 1981.h.136-137.

menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dalam pasal 4, 5, 39, dan 53 KUHP buku I dan buku II adalah melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Namun demikian pengertian mengenai kejahatan dan pelanggaran dapat diketahui dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Menurut MvT kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian <sup>7</sup>.

Dalam kamus hukum yang dimaksud dengan kejahatan adalah tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari pelanggaran<sup>8</sup>.

Kejahatan, pertama-tama adalah suatu konsep yuridis berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum.<sup>9</sup> Soejono mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma

---

<sup>7</sup>. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University, 1987.h.71.

<sup>8</sup>. J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T.Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h.81.

<sup>9</sup>. Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984.h.31.

(hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Menurut Richard Quinney sebagaimana dikutip Soejono bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain, dengan begitu kejahatan adalah suatu yang diciptakan.<sup>10</sup>

Melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan sama halnya melakukan suatu perbuatan yang bukan kejahatan, hingga kejahatan diperoleh melalui suatu proses belajar, interaksi antar individu dan atau kelompok . dapat dikatakan banyak faktor yang dapat menimbulkan suatu tindak perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan seperti misalnya karena faktor keluarga, pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan pergaulan maupun tempat tinggal.<sup>11</sup>

Pada umumnya seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan karena adanya faktor-faktor:

- a. Niat atau kehendak yang timbul karena pengaruh endogen atau dari keadaan pribadi seseorang seperti cacat mental, cacat fisik dan atau pengaruh exogen atau dari luar pribadi seseorang seperti pendidikan,

---

<sup>10</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.h.16.

<sup>11</sup> Tumbu Saraswati, *Kejahatan yang Dilakukan Oleh Perempuan*, Makalah Seminar Kriminologi Ke VII, Semarang, 1-2 Desember 1994.h.1.

pergaulan, keluarga, sosial ekonomi, lingkungan dimana seseorang berada.

- b. Kesempatan yang timbul dari pengaruh keadaan pribadi seseorang (endogen) misalnya mental disorder, kadar emosional yang tinggi, rasa superioritas yang berlebihan, tekanan-tekanan psikologis dan pengaruh dari luar diri atau exogen seperti tekanan kehidupan, pendidikan yang kurang memadai, lemahnya kontrol sosial masyarakat.<sup>12</sup>

Arti kekerasan dalam kamus Bahasa Indonesia, adalah 1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan<sup>13</sup>. Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*)<sup>14</sup>.

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

---

<sup>12</sup>. Ibid, h.2.

<sup>13</sup>. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993, h.425.

<sup>14</sup>. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.20.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya<sup>15</sup>. Sedangkan Pasal 90 KUHP menentukan, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- mendapat cacat besar ;
- lumpuh (kelumpuhan);
- akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

---

<sup>15</sup> . R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981,h.107.

Definisi kekerasan dari kedua pasal tersebut hanya menyangkut kekerasan fisik saja (Pasal 89 dan Pasal 90) yang berakibat luka pada badan atau fisik, tidak meliputi kekerasan lainnya seperti psikhis, sexual, dan ekonomi sesuai dengan Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan. Dua pasal tersebut sangat umum dan luas, kerana kekerasan dalam kedua pasal itu dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, tidak khusus dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam satu rumah tangga.

Padahal, apabila dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, sebenarnya tindak kekerasan secara sosiologis dapat dibedakan dari aspek fisik, seksual, psikologis, politis, dan ekonomi. Pembedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.<sup>16</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita merumuskan kejahatan kekerasan ke dalam berbagai pasal yaitu 285-301 (kejahatan susila), 310-321 (penistaan), 324-337 (penghilangan kemerdekaan), 338-340 (pembunuhan), 351-356 (penganiayaan), dll. Sedangkan pengertian kejahatan kekerasan itu sendiri dalam KUHP tidak diberikan definisinya.

---

<sup>16</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi Dan Hukum)*, Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Pidana Dan Kriminologi Yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tanggal 23-30 November 1998.h.5.



Ada beberapa pendapat dari para sarjana yang memberikan definisi tentang kejahatan kekerasan. Menurut Hudioro, kejahatan kekerasan adalah <sup>17</sup> :

1. tindak pidana yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang (dengan sengaja untuk mendapatkan barang orang lain secara tidak sah atau mencederai dan atau membunuh orang).
2. adalah suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yaitu secara kekerasan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, maka perbuatan ini bersifat fisik.
3. adalah tindak pidana yang bersifat psikis, sehingga menyebabkan orang lain tidak berdaya atau mengalami tekanan-tekanan yang sangat merugikan malahan berakibat fatal.

Studi tradisional tentang kejahatan akan mencari jawabannya pada batasan tentang kejahatan kekerasan terutama di dalam undang-undang pidana, di samping batasan sosial. Selanjutnya dengan menggunakan batasan undang-undang tersebut, masalah kejahatan kekerasan dibicarakan antara lain mengenai:

- bentuk-bentuknya, perkembangan dan penyebarannya, dengan mencarinya melalui data statistik kriminal.
- sebab-sebabnya (etiologi kriminal) dengan mencarinya pada ciri-ciri biologis, sosial dan psikisnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> . Hudioro, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan*, Makalah dalam Seminar Kriminologi FISIP UI, 29 Nopember 1984, h.3.

<sup>18</sup> . I.S. Susanto, *Kajian Kriminologis Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, 1997, h.114.

Menurut Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh Mulyana W.Kusumah, bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat serta perampokan dan pencurian berat, sedangkan pelakunya adalah mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat kematian maupun luka bagi sesama manusia<sup>19</sup>. Sedangkan menurut Soedarto, kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan. Daya kekuatan itu harus cukup kuat intensitasnya. Mengenai ancaman kekerasan dapat dikemukakan bahwa selalu harus ditinjau sifat dari perbuatan yang dilakukan juga diperhatikan pula bagaimana pandangan dari orang yang mendapat ancaman itu. Misalnya, pilot diancam oleh orang yang tampaknya membawa granat di sakunya untuk merubah rute penerbangannya, akan tetapi kemudian ternyata bahwa orang itu tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini tetap ada ancaman kekerasan<sup>20</sup>.

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang, atau merusak suatu barang. Sejalan dengan perkembangan waktu, maka definisi kekerasan pun mengalami perkembangan dan perluasan. Kekerasan bukan hanya suatu

---

<sup>19</sup> . Mulyana W.Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, 1982,h.24.

<sup>20</sup> .Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni ,Bandung, 1986,h.25-26.

tindakan yang bertujuan atau berakibat melukai atau merusak barang, tetapi ancaman pun dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan.<sup>21</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menangkap, mengikat, menahan dan sebagainya.<sup>22</sup> Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik manusia maupun integritas mental psikologis seseorang.<sup>23</sup>

Selanjutnya I.Marsana Windhu, sebagaimana dikutip oleh Noeke Sri Wardani mengambil definisi kekerasan dari Johan Galtung sebagai berikut: kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Galtung dalam mendefinisikan kekerasan sangat

---

<sup>21</sup> .Apong Herlina, *Memperjelas Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan (usulan perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana pada proses pelaporan dan pemeriksaan)*, dalam Chatarina Puramdani Hariti, (ed), *Perubahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan, 2000, h13.

<sup>22</sup> . H.A.K. Mochammad Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, Jilid I, Alumni Bandung, 1986, h.25.

<sup>23</sup> . Mansour Fakh, *Perubahan Sosial Perspektif Gender*, Bahan Lokakarya "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Rancangan KUHP", diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan LBH APIK, Yogyakarta, 11-13 Maret 1999. h.7.

luas, karena Galtung tidak hanya melihat konsep kekerasan sebagai penghancuran kemampuan somatik seseorang atau dalam bentuk ekstrimnya membunuh seseorang, tetapi kekerasan menurut Galtung lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya bagi manusia.<sup>24</sup>

Menurut Galtung ada 6 (enam) dimensi penting dari kekerasan itu adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan *pertama*, kekerasan fisik dan psikologis. Ini berkaitan dengan pendapat Galtung yang menolak kekerasan dalam arti sempit, yang hanya berpusat pada kekerasan fisik. Galtung menggunakan kata *hurt* dan *hit* untuk mengungkapkan maksud ganda baik kekerasan fisik maupun psikologis. Kekerasan psikologis meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang dimaksud untuk meredusir kemampuan mental atau otak. Disamping itu Galtung juga memberikan contoh kekerasan fisik dan psikologis dengan contoh cara-cara kekerasan seperti memenjarakan atau merantai orang, perbuatan ini tidak hanya kekerasan fisik saja, tetapi juga mengurangi kemampuan jiwa (rohani) seseorang.
- b. Perbedaan *kedua*, pengaruh positif dan negatif. Untuk menerangkan pendekatan ini, Galtung mengacu pada sistem orientasi imbalan (*reward oriented*). Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan menghukum bila ia bersalah, tetapi juga dengan memberi imbalan. Dalam sistem imbalan sebenarnya terdapat "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun memberi kemikatan dan euphoria. Yang mau ditekankan disini adalah bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.
- c. Perbedaan *ketiga*, ada obyek atau tidak. Meskipun suatu tindakan tidak ada obyek menurut Galtung tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis. Contohnya adalah tindakan melemparkan batu kemana-mana atau uji coba senjata nuklir. Tindakan ini tidak memakan korban, tetapi membatasi tindakan manusia.

---

<sup>24</sup> . I.Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, dalam Noeke Sri Wardani, *Persepsi Masyarakat Bengkulu tentang Kejahatan Kekerasan*, Tesis, UNDIP, Semarang, 1995, h.70.

- d. Perbedaan *keempat*, ada subyek atau tidak. Sebuah kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Dampak atau akibat kekerasan langsung dapat dilacak pelakunya (manusia konkrit), sedangkan kekerasan struktural sulit untuk menemukan pelaku manusia konkrit. Untuk kasus yang terakhir ini berarti kekerasan sudah menjadi bagian dari struktur itu (strukturnya jelek) dan menempatkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama. Lebih lanjut Galtung menjelaskan tentang kekerasan struktural ini dengan mencuatkan "situasi-situasi negatif" seperti ketimpangan yang merajalela, sumber daya, pendapatan, kepandaian, pendidikan serta wewenang untuk mengambil keputusan mengenai distribusi sumber dayapun tidak merata.
- e. Perbedaan *kelima*, disengaja atau tidak. Perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai "kesalahan". Untuk membedakan Galtung melihat konsep kesalahan sebagaimana dipahami dalam etika Yahudi-Kristiani dan Yurisprudensi Romawi lebih dikaitkan dengan tujuan dari pada akibat dari tindakan. Hal ini berlawanan dengan definisi kekerasan Galtung yang menitik beratkan pada akibat.
- f. Perbedaan yang *keenam*, yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak nyata (manifest), baik yang personal maupun yang struktural, segera dapat dilihat. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (latent), tetapi bias dengan mudah meledak. Galtung berpendapat bahwa kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Misalnya saja, adanya kekejaman, pembunuhan seperti yang terjadi dengan perkuliahian rasial atau agama di India dan Banglades. Situasi ini oleh Galtung disebut sebagai situasi keseimbangan yang goyah atau *a situation of unstable equilibrium*.<sup>25</sup>

Dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP atau Konsep KUHP), kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan

---

<sup>25</sup> . Ibid,h.70-74.

menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 159 Konsep 1999/2000). Sedangkan ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam (Pasal 160). Luka berat adalah (Pasal 175):

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat (kudung);
- e. lumpuh;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari empat minggu; atau
- g. gugur atau matinya kandungan.

Mengenai pola-pola kekerasan, menurut Martin R.Haskell dan Lewis Yablonsky sebagaimana dikutip oleh Mulyana W.Kusumah mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yaitu: <sup>26</sup>

- a. Kekerasan legal  
Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya: sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
- b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi  
Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

---

<sup>26</sup> . Mulyana W.Kusumah, Op-Cit.h.26.

c. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan misalnya : pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi. Kejahatan-kejahatan seperti pelacuran serta narkoba dapat dikategorikan jenis kejahatan ini.

d. Kekerasan yang tidak berperasaan (*irrational violence*)

Kejahatan ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan "*raw violence*" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

## **B. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*).**

Sebelum membahas mengenai pengertian kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*), maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian kekerasan terhadap perempuan.

Ketika persoalan kekerasan terhadap perempuan (KTP) mulai diangkat ke permukaan, terjadilah perdebatan sengit yang panjang dalam menyepakati apa sebenarnya tindak kekerasan terhadap perempuan itu.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan memang acapkali menimbulkan kontroversi karena masyarakat masih sangat awam dengan wacana hak asasi perempuan. Namun, bila kita tengok batasan internasional sebagaimana yang terumus dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DPKTP) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 Desember 1993, maka akan

ditemukan semacam “rambu-rambu” yang akan memudahkan alur berpikir tentang kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 1 Deklarasi memuat definisi kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”<sup>27</sup>

Batasan tersebut memberikan rambu-rambu penting dalam memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan, yaitu :

*pertama* adalah aspek bentuk tindakan yang dapat berupa tindakan verbal dan non verbal, sehingga memang amat sangat luas cakupannya, *rambu kedua* adalah asumsi jender, yaitu alasan “ideologis” mengapa seseorang diperlakukan secara sedemikian rupa, yang dalam hal ini adalah karena jendernya, *rambu ketiga* adalah dampak atau akibat yang dirasakan oleh orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, *rambu terakhir* adalah ruang lingkup yaitu bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat saja terjadi di ruang publik maupun di ruang domestik.<sup>28</sup>

Ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan menurut Pasal 1 Deklarasi tersebut di atas yaitu:

- Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender based violence);

---

<sup>27</sup> . Lampiran 2, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993*, dalam T.O.Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni Bandung, 2000.h.389.

<sup>28</sup> . Nurhasyim, *Harian Kompas* 16 Desember 2001.



- Yang berakibat atau mungkin berakibat;
- Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
- Secara fisik, seksual atau psikologis;
- Termasuk ancaman tindakan tertentu;
- Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
- Baik yang terjadi di depan umum/masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Menurut Sulistyowati Irianto, berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan akan menyangkut permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non-fisik atau verbal, dan kekerasan seksual), tempat terjadinya (di dalam rumah tangga, dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang dengan hubungan dekat dan orang asing).<sup>29</sup>

Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa tindak kekerasan terhadap wanita meliputi segala tindakan seseorang yang menyakiti seorang wanita, baik secara fisik maupun non fisik. Argumentasi bahwa tindak kekerasan terhadap wanita harus lebih luas dari sekedar tindak kekerasan secara fisik didasarkan pada suatu

---

<sup>29</sup> . Sulistyowati Irianto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (suatu tinjauan Hukum berperspektif Feminis)*, Artikel dalam Jurnal Perempuan Edisi 10, Februari-April 1999.h.9.

pemikiran bahwa tindak kekerasan non fisik tidak jarang mempunyai dampak yang lebih serius dari pada yang fisik.<sup>30</sup> Istilah kekerasan terhadap perempuan juga berarti segala bentuk kekerasan yang berdasar jender yang akibatnya dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan-perempuan termasuk disini ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadinya di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang.<sup>31</sup>

Hasil pemantauan Kalyanamitra, menyampaikan pola konseptual sebagai berikut : <sup>32</sup>

*Pertama*, definisi kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk-bentuk kekerasan meliputi pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan pasangan istri/pacar, pembunuhan, intimidasi, teror, pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi tertentu, stigmatisasi dan penghancuran hak untuk hidup layak, memperdagangkan perempuan untuk tujuan apapun, *kedua* terdapat pola hubungan yang berbasis pada suatu kekuasaan atas dasar usia, struktur kerja, struktur keluarga, kelas social, pemerintahan dan militer, kebijakan, adat, agama, hubungan pribadi laki-laki dengan perempuan, *ketiga* pola kekerasan yang terjadi dalam situasi konflik bersenjata.

---

<sup>30</sup> .Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Kekerasan terhadap Wanita*, Makalah pada SEMILOK "Tindak Kekerasan Terhadap Wanita" yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI) , Jakarta, 15 September 1992.h.2.

<sup>31</sup> .Triningtyasasih, *Pengalaman Sebuah Women's Crisis Center*, dalam Natalie Kollmann *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kerjasama YLKI dan Ford Foundation, 1998.h.62.

<sup>32</sup> .Toeti Heraty, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Perempuan, Edisi 09 November 1998-Januari 1999.h.7.

Sedangkan definisi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang terdapat dalam Pasal 1 di atas.

Anne Grant dalam karyanya *Breaking the Cycle of Violence* mendefinisikan kekerasan domestik sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*coersive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.<sup>33</sup>

Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga di mana biasanya yang berjenis kelamin laki-laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri).<sup>34</sup>

Draft Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) yang disusun oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada Deklarasi di atas, memberikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1), sebagai berikut:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindak pidana yang dilakukan seorang secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama terhadap seorang perempuan dan pihak-pihak yang

---

<sup>33</sup> . Achmad Chusairi, *Menggugat Harmoni*, Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 2000.h.109.

<sup>34</sup> .Maggie Humm, dalam Gadis Arivia " Mengapa Perempuan Disiksa?", Jurnal Perempuan Vol.01 Agustus/September 1996.h.4.

tersubordinasi lainnya, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan atau psikis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.<sup>35</sup>

Melihat definisi tersebut di atas, maka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik saja. Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan-kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Draft Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau sampai menyebabkan kematian;
- b. yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita psikis berat.
- c. yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat serta integritas tubuh atau seksualitasnya, yang berdampak secara fisik maupun psikis.
- d. yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiadanya akses, kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> . Bunyi Pasal 1 ayat (1) *Draft Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tim Perumus Draft Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 21 Maret 2002.h.2.

<sup>36</sup> . Ibid.h.3.

Beberapa ahli mendefinisikan kekerasan dalam keluarga dengan perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya (Kyriacou, 1998), atau secara lebih luas disebutkan sebagai penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, yang melanggar hak individu/perdata (Abbott dkk, 1997).<sup>37</sup>

Adanya kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga serta mengabaikan hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dari suatu masyarakat tertentu. Di dalam masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/menantu, ibu/istri, dan ayah/suami).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> . Budi Sampurna, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, dalam Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni Jakarta, 2000.h.54.

<sup>38</sup> .Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Kumpulan karangan), Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993,h.269.

### C. Ruang Lingkup dan Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*).

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Draft Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang termasuk *orang* dalam lingkup rumah tangga adalah :

- a. pasangan atau mantan pasangan;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan arah, perkawinan, adopsi, dan hubungan adat;
- c. orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang *menetap dan tidak menetap* di sebuah rumah tangga;
- d. orang yang masih tinggal atau pernah hidup bersama.

Sedangkan Pasal 1 Ayat (3) Draft Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan , pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah seseorang dalam lingkup rumah tangga atau berada di suatu rumah tangga secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (*domestic violence*) di atas, bila diperhatikan secara lebih mendalam *domestic violence* tergolong kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena mengancam kebebasan manusia untuk hidup tenang jauh dari segala ancaman<sup>39</sup>. *Domestic violence* juga merupakan jenis kejahatan yang keji, karena dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya merupakan orang yang paling dekat dengan korban.

---

<sup>39</sup> . Bunyi Pasal 3 *Pernyataan Umum Tentang Hak-hak Asasi Manusia*.

Keluarga seharusnya merupakan tempat di mana seseorang merasa aman dan bebas dari rasa takut, sehingga bila dalam keluarga terjadi kekerasan maka seolah-olah tidak ada tempat lagi bagi seseorang untuk dapat hidup aman dan tenteram.

PBB sendiri dalam Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia Pasal 16 butir (3), menyatakan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara, sehingga *domestic violence* dipandang sebagai suatu ancaman yang serius terhadap hak-hak asasi manusia baik bagi individu maupun bagi keluarga secara keseluruhan, karena itu tiap manusia selayaknya mendapat perlindungan dari ancaman kejahatan ini.

### **Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga**

Pasal 2 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan membagi kekerasan terhadap perempuan, meskipun tidak membatasinya ke dalam tiga kelompok yaitu :

- a. tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-

- lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, di manapun terjadinya.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Draft Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6 sebagai berikut:

Pasal 3, Setiap orang baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dilarang melakukan kejahatan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, berupa:

- a. rasa sakit;
- b. cacat permanen;
- c. menyebabkan gugurnya kandungan
- d. matinya korban

Adapun Pasal 4 menyebutkan sebagai berikut:

Setiap orang, baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dilarang melakukan kekerasan psikis, berupa:

- a. intimidasi
- b. merendahkan martabat seseorang (mengecilkan arti seseorang)
- c. merusak barang-barang
- d. mengancam secara fisik, psikis, seksual
- e. membiarkan anak-anak untuk melihat atau mendengar suatu penyiksaan baik secara fisik, seksual maupun psikis dari orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan atau di luar lingkungan keluarga.

---

<sup>40</sup> . Lampiran 2.Op-cit.h.389.



Bunyi Pasal 5, Setiap orang baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dilarang melakukan kekerasan seksual, berupa:

- a. pelecehan seksual seperti membanding-bandingkan/ melecehkan kapasitas seksual pasangan;
- b. memaksa melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban kekerasan dalam rumah tangga atau disaat korban kekerasan dalam rumah tangga tidak menghendaki;
- c. memaksa hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, seperti memaksa minum obat perangsang atau penggunaan alat;
- d. memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu;
- e. memaksa korban melihat pasangan berhubungan seksual dengan orang lain;
- f. melakukan hubungan seksual dimana salah satu pihak berada dalam posisi tidak setara untuk tujuan-tujuan tertentu.

Selanjutnya bunyi Pasal 6, setiap orang baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dilarang melakukan kekerasan ekonomi, berupa:

- a. menciptakan ketergantungan korban kekerasan dalam rumah tangga kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara ekonomi dengan membatasi dan atau melarang korban kekerasan dalam rumah tangga untuk bekerja di dalam dan atau di luar rumah;
- b. membiarkan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk dieksploitasi di dalam rumah dan atau di luar rumah;
- c. mengeksploitasi korban bekerja di dalam rumah dan atau menelantarkan anggota keluarga;
- d. mengontrol ketat pengeluaran rumah tangga;
- e. mengharuskan istri membuat laporan keuangan.

Pendapat lain mengatakan bahwa dalam kekerasan terhadap istri terdapat berbagai macam bentuk kekerasan yang mencakup kekerasan

fisik, kekerasan psikologis (emosional), kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.<sup>41</sup>

#### -Kekerasan fisik

Bentuk kekerasan yang termasuk disini adalah menampar, memukul, menarik rambut, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata, menendang, mengabaikan kesehatan istri dan sebagainya. Kekerasan fisik akan membawa akibat baik secara fisik maupun psikologis. Biasanya kekerasan fisik meninggalkan bekas-bekas seperti muka biru lembam, badan menjadi sakit, tulang punggung retak akibat pemukulan, kepala pusing, gegar otak, gigi patah, parut-parut, pada kasus tertentu ada korban yang sampai pingsan dan harus dirawat di rumah sakit dan yang lebih tragis bisa mengakibatkan meninggal. Seringkali suami yang melakukan penganiayaan secara fisik, cukup pintar dalam memilih daerah tubuh yang dipukul sehingga tidak nampak bekasnya oleh orang lain. Sedangkan akibat secara psikologis misalnya malu terhadap tetangga, rendah diri, putus asa, ingin bunuh diri, dendam, tidak mempunyai semangat hidup bahkan bisa membuat korban kehilangan kesadaran atau ingatan.

#### -Kekerasan psikologis atau emosional

Bentuk kekerasan yang termasuk disini adalah penganiayaan secara emosional seperti menghina istri dan atau melontarkan kata-kata yang

---

<sup>41</sup> . Kekerasan Terhadap Istri, Rifka Annisa, WCC Yogyakarta, 1999.h.1-3

dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri istri misalnya meremehkan, memaki-maki istrinya, melarang istri untuk mengunjungi saudara maupun teman, melarang istri terlibat dalam kegiatan social kemasyarakatan, mengancam akan menceraikan istri dan memisahkan dengan anak-anak bila tidak menurut kemauan, selingkuh dan sebagainya. Kekerasan psikologis ini akan membawa dampak buruk terhadap anggota keluarga yang menjadi korban yaitu istri misalnya perasaan tersiksa, ketakutan, sedih, tidak percaya diri, kuatir, cemas bahkan dapat memunculkan perasaan dendam.

#### -Kekerasan seksual

Bentuk kekerasan yang termasuk disini meliputi pengisolasian atau menjauhkan istri dari kebutuhan batin, memaksa istri melakukan hubungan seksual pada saat istri sedang tidak ingin melakukan misalnya karena sedang sakit, menstruasi atau sebab lainnya, memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui oleh istri, memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan orang lain atau memaksa istri menjadi pelacur, memaksa istri menggugurkan kandungan dan sebagainya.

#### -Kekerasan ekonomi

Bentuk kekerasan yang termasuk disini meliputi tidak memberi nafkah istri, membatasi atau mengontrol istri dengan memanfaatkan

ketergantungan ekonomis istri, menguasai hasil kerja istri, memaksa istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan suami dan sebagainya.

#### **D.Tinjauan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*) Dalam Berbagai Perspektif.**

##### **1.Domestic violence dalam perspektif hukum**

Sebagai warga negara, hak-hak dan eksistensi perempuan sebagaimana juga laki-laki dilindungi dan dijamin oleh konstitusi kita. Secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 27 (1) UUD 1945, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Namun dalam realitasnya, implementasi hak-hak dan eksistensi perempuan mengalami hambatan-hambatan dalam berbagai aspek kehidupan. Munculnya persoalan perempuan yang kerap terjadi seperti dalam kasus buruh perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan perkosaan dan sebagainya menunjukkan masih terbentangnya jurang yang lebar bagi perempuan dalam meraih hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum .

Pada dasarnya berbagai persoalan tersebut terjadi oleh karena sistem hukum yang berlaku saat ini sama sekali tidak responsive terhadap kepentingan perempuan, yang dimaksud dengan hukum disini adalah meliputi baik substansi, struktur maupun budaya hukum masyarakat). Tidak responsifnya sistem hukum tersebut oleh karena masih dianutnya ideologi patriarki yang wujudnya antara lain adanya

pola relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan gender yang dicirikan adanya diskriminasi terhadap perempuan.

Peluang kekerasan terhadap perempuan ini terjadi oleh karena nilai budaya dan ajaran/tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara, mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami di dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah punya "kekuasaan" untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya, terutama ketika istri dianggap tidak patuh (durhaka/nusyuz). Pembakuan peran negara tersebut bisa kita lihat dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 31 ayat 3 yang menegaskan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga".

Pada dasarnya menurut ketentuan yang berlaku, tindak kekerasan terhadap istri dapat dihukum. Oleh karena dalam KUHP memuat pemikiran bahwa penganiayaan ataupun tindak kekerasan terhadap istri sesungguhnya merupakan tindak pidana. Untuk itu sanksi yang dikenakan lebih berat sepertiga dari sanksi bagi perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351-356 bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka

berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selanjutnya Pasal 356 menyebutkan bahwa pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga, bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya, istrinya atau anaknya.

Sekalipun ada pasal-pasal yang bisa menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam prakteknya hal ini sulit diterapkan. Adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa persoalan keluarga “aib” untuk diceritakan ke pihak lain, membuat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan. Kalaupun seandainya dilakukan upaya hukum, seringkali persoalan kekerasan dalam rumah tangga berakhir pada proses perdata (perceraian), atau dengan kata lain tidak berlanjut ke proses pidana, dan seandainya pun akan dilakukan sampai ke proses pengadilan, tidak jarang kasus kekerasan dalam rumah tangga berguguran di tingkat kepolisian. Data-data pendampingan kasus kekerasan di LBH-APIK menunjukkan betapa tidak responsifnya para aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti laporan kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Baik aparat di tingkat kepolisian, jaksa, maupun hakim yang memang tidak memiliki sensitifitas

gender. Sikap aparat disisi lain juga di dukung oleh budaya masyarakat yang lebih menekankan pada ideologi harmonisasi keluarga.<sup>42</sup>

## **2. Domestic violence dalam perspektif agama**

Pemukulan terhadap istri sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat patriarkhis, khususnya masyarakat islam, hampir selalu diterjemahkan sebagai bentuk pengajaran suami terhadap istri dalam rangka pembinaan rumah tangga. Istilah kekerasan dalam rumah tangga sendiri dianggap oleh masyarakat di Indonesia sebagai hal yang asing yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat dan yang lebih telak, bertentangan dengan nilai-nilai agama (Islam).

Persoalannya adalah apakah benar agama melegitimasi hal tersebut ?. Teks agama yang dianggap melegitimasi kekerasan terhadap istri tersebut adalah Surat An-Nisa 34 yang terjemahannya berbunyi: "laki-laki adalah qawwam (pemimpin) atas perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan), sebab itu perempuan yang shaleh adalah yang taat kepada Allah (qanitat) dan menjaga diri di balik pembelakangan suaminya (hafizah lil ghaib), sebagaimana Allah menjaganya. Perempuan-perempuan yang

---

<sup>42</sup> . Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif untuk Perempuan : Sosialisasi Masalah dan Draft RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH-APIK, Jakarta, 2000,h.17.

kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah (wadhibuuhunna) mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Kata nusyuz dan kata dharaba adalah dua kata kunci dalam menafsirkan QS.4:34 (ayat nusyuz) dari segi penafsiran tekstual. Hampir semua ulama baik konvensional maupun kontemporer mengartikan nusyuz sebagai durhaka terhadap suami atau tidak patuh terhadap suami. Lebih jauh dalam tafsir Ibnu Katsir, nusyuz diartikan sebagai melawan suami, membangkang, berpaling, marah, meninggalkan rumah tanpa izin. Penafsiran ini terkesan bias laki-laki, padahal bila dilihat kembali teks ayat di atas, pengertian nusyuz sebenarnya sudah ditafsirkan dalam ayat itu sendiri yaitu tindakan yang tidak mencerminkan kesalehan, yang dalam ayat tersebut ditandai dengan dua ciri yaitu taat kepada Allah dan menjaga dirinya dibalik pembelakangan suami (ketika suami tidak ada), atau kata populernya melakukan perselingkuhan.

Sedang kata kunci kedua, wadhribuuhunna berasal dari kata dharaba. Mayoritas ulama baik ulama konvensional maupun ulama pembaharu sepakat mengartikan kata dharaba sebagai pukulan. Dalam Al Qur'an kata dharaba diartikan pukul, berpergian, berusaha, membuat/menimpakan (perumpamaan).



Kalau kita cukupkan pada tafsir tekstual ayat, maka dari penafsiran kedua kata kunci dalam ayat nusyuz di atas, seharusnya hukuman fisik (pukulan) terhadap istri yang merupakan hukuman maksimal, diterapkan hanya pada kondisi dimana istri keluar dari jalur agama dan istri yang melakukan perselingkuhan. Ini merupakan bentuk tertinggi dari penyelewengan istri yang dikategorikan sebagai perilaku durhaka istri terhadap suami. Terhadap kondisi inipun, pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan yang tidak membahayakan dan membekas, tidak menampar dengan tangan, tidak menampar muka, tidak mengarah pada penganiayaan atau tidak dengan maksud sengaja menyakitinya. Terhadap hal ini ulama sepakat dengan merujuk pada hadist Nabi : "Jika mereka (istri) tetap durhaka, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan (ghairu mubarrih)".

Penafsiran ulama terhadap kata nusyuz yang cenderung memperlebar pengertian nusyuz terhadap tindak-tanduk istri yang tidak disukai laki-laki adalah jelas menunjukkan bias penafsiran yang patriarkhi. Seharusnya penafsiran terhadap ayat-ayat kitab suci idealnya tidak lepas dari situasi dan kondisi yang melatarbelakangi kemunculannya, atau mempertimbangkan teks dan konteks yang berlaku saat ini. Penafsiran yang ada dan disosialisasikan selama ini cenderung bias gender dalam kondisi dan membatasi ruang gerak perempuan, hal ini dapat dipahami mengingat mayoritas penafsir adalah laki-laki.

Dalam kondisi saat ini banyak ayat-ayat yang kemudian dipolitisir untuk kepentingan kelompok tertentu (laki-laki), misalnya dalam hal kepemimpinan atau peluang untuk memaafkan kekerasan di dalam rumah tangga seperti poligami atau pemukulan suami terhadap istri dengan dalih memberi "pengajaran".

Jelas sekali bahwa pesan moral yang ingin disampaikan al-qur'an dalam ayat nusyuz di atas adalah penghapusan praktek pemukulan (kekerasan) terhadap perempuan yang kerap terjadi pada masa diturunkannya ayat tersebut. Hal ini sekaligus menolak pandangan bahwa islam melegitimasi budaya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

### **3.Domestic violence dalam perspektif sosial budaya**

Nurjanah (38 tahun) telah melakukan penusukan terhadap suaminya. Penusukan itu dilatar belakangi karena Nurjanah sering mendapat kekerasan fisik (ditendang, dipukul, ditonjok, ditusuk pakai gunting, ditampar), kekerasan psikis (seperti diancam, dicaci maki, dikata-katai, dengan ucapan anjing, pelacur, ditinggalkan suami beberapa waktu lamanya dan kemudian diketahui suaminya berpacaran dan menikah dengan perempuan lain), kekerasan ekonomi (tidak diberi nafkah, dilarang berdagang, dibohongi mengenai keuangan atau

penghasilan). Dari hari ke hari, frekuensi kekerasan yang dialami Nurjanah semakin meningkat.<sup>43</sup>

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seringkali perempuan melakukan kekerasan setelah sekian tahun lamanya ia menjadi target kekerasan. Kekerasan ini dalam bentuk resistensi perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Ketika perempuan menjadi pihak yang mengalami kekerasan dilecehkan, disiksa, dipukuli, dianiaya, dilempari benda-benda, bahkan diperkosa oleh orang yang selama ini dekat dengan hidupnya atas nama "*cinta*", lingkungannya hanya membisu atau menyalahkan dirinya (*victim blaming*), atau menempatkan dia sebagai orang yang ikut bertanggung jawab atas "nasib" yang menimpanya (*victim precipitating*). Kenapa ada kondisi demikian? Mengapa sulit mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga ?.

Terdapat sebuah konspirasi yang ada dibalik sulitnya kekerasan dalam rumah tangga mengadukan persoalannya. Apa yang kemudian disebut sebagai *Conspiracy of Silence*, antara lain:

1. Kuatnya anggapan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah privat yang harus diselesaikan secara privat pula antara suami-istri.
2. Masih dipegangnya mitos tentang institusi keluarga. Dalam salah satu muatan mitos ini ditekankan bahwa istri berkewajiban mengabdikan pada (kepentingan) suami sebagai kepala keluarga. Bentuk pengabdian ini, antara lain menjaga nama baiknya yang sekaligus diartikan sebagai

---

<sup>43</sup> . Suara Apik, Edisi 13 Tahun 2000, LBH-APIK Jakarta, h.12.

"nama baik keluarga", maka melaporkan tindak-tanduk suami yang tidak berkenan dengan hati istri selalu ditafsirkan oleh masyarakat, suatu pelanggaran terhadap nama baik keluarga. Hanya istri " yang tidak baiklah " yang akan melakukan hal itu. Dalam filsafat hidup orang Jawa, umpamanya dikenal kata-kata "olo meneng, becik meneng" (baik buruk maupun baik, orang harus tetap tutup mulut), atau "swarga nunut neraka katut" (istilahnya baik buruk suami istri harus tetap mengikutinya).

3. Masalah ketergantungan ekonomi pada suami menyebabkan istri (dan seringkali disertai desakan seluruh anggota keluarga) merasakan tidak perlu melaporkan perbuatan suami, karena kalau suami ditahan, ditangkap sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga.
4. Merasa takut terhadap suami yang akan bertambah "buas" terhadap dirinya, atau terhadap anggota keluarga (biasanya terhadap anak-anak) kalau istri melapor pada pihak yang berwenang. Biasanya dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga disamping berupa kekerasan fisik dan atau seksual pelaku juga melampirkan kekerasannya dalam bentuk ancaman-ancaman agar istri tidak melakukan hal-hal yang "salah" menurut suami dan tidak melaporkan apa yang dialaminya pada siapapun. Masing-masing ancaman ini akan mengundang resiko-resiko berupa sanksi-sanksi berikutnya yang dijatuhkan suami atas dirinya seperti diceraikan, ditinggal pergi, dibunuh, dsb.
5. Anggapan bahwa suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu bukti dari rasa cintanya pada istri dan anak. Anggapan ini berasal dari stereotype seksual laki-laki yang antara lain menempatkan jenis kelamin ini sebagai makhluk agresif, kuat, terbiasa dengan cara-cara yang berkualitas dan berkuantitas kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Akibatnya dalam penyelesaian masalah yang dianggap berkaitan dengan cintanya pada istri dan anak-anak, cara-cara kekerasan merupakan hal (baik di tingkat ide maupun perbuatan) yang dilegitimasi secara sosial.
6. Anggapan bahwa perempuan adalah pihak yang patut disalahkan, kalau mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dalam hubungan seksual suami-istri. Anggapan seperti ini dicerminkan dalam ungkapan kata sehari-hari yang sering kita dengar, misalnya "enggak bakalan laki-laki ngegebukin bininya, kalau bukan salahnya si bini", atau "lakinya bener-bener cinta sama bininya, tapi bininya yang nggak tahu diri. Ya pantas aja kalau laki-lakinya jadi kesel. Ditabok deh bininya buat kasih ajaran ....." dsb.
7. Anggapan bahwa dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya pelaku yang harus bertanggung jawab atas hal itu, tapi

- juga istri. Katanya "tidak ada asap, kalau tidak ada api". Dilakukannya suatu tindakan merupakan akibat dari tindakan atau sikap yang mendahuluinya. Jadi ada hubungan sebab akibat atau resiprokal, sehingga tanggung jawab harus dibagi dua antara pihak-pihak yang saling terlibat.
8. Anggapan bahwa suami (pelaku) sering mengalami kekerasan pada masa kecil/ remaja yang dilakukan oleh, terutama orang tua terhadap dirinya. Pengalaman pahit ini membekas dalam hidupnya dan "secara tidak sengaja" kekerasan yang dialaminya itu tampil ketika dia berhadapan dengan masalah sekarang. Kekerasan itu dilampiaskan pada orang-orang terdekat pada dirinya (istri dan anak) yang diketahuinya betul bahwa mereka (karena mitos-mitos tentang institusi keluarga) tidak akan menentangnya atau berbalik melawannya.
  9. Anggapan-anggapan ini diinternalisasi pada perempuan secara terus menerus sebagai suatu kebenaran yang tidak boleh disangkal atau dipertanyakan lagi, maka bukan suatu hal yang mengherankan, kalau ada perempuan yang mempersalahkan dirinya sendiri, merasa ikut bertanggung jawab terhadap kekerasan yang dialaminya, merasa takut, dan yang lebih fatal lagi adalah memahami kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari takdir hidupnya yang mustahil dihindari.
  10. Anggapan-anggapan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) menjadi dasar pemikiran bahwa kekerasan suami terhadap istri hanya berlaku sesaat saja. Kalau masalah yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara baik-baik, maka suami tidak akan melakukan hal itu lagi.
  11. Ada perempuan yang ingin melapor kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, tapi karena tidak ada informasi yang jelas dia tidak tahu harus melapor kepada siapa, atau kemana.
  12. Ada perempuan yang hendak melaporkan hal ini pada polisi, karena menganggap bahwa hanya polisilah yang dapat membantu menyelesaikan hal tersebut. Tapi pos polisi terdekat sangat jauh dari tempat dia berada.
  13. Ada perempuan yang merasa bahwa polisi (sebagai bagian dari masyarakat) tidak akan mempercayai, atau meremehkan laporannya, sehingga di ameliat dirinya dilecehkan bukan hanya oleh suami, tapi juga oleh pihak aparat yang seharusnya melindungi sebagai warga sebuah negara dari kejahatan yang dialaminya.
  14. Sikap dan pandangan masyarakat yang menempatkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai isu privat yang harus diselesaikan secara privat pula, seringkali dicerminkan oleh pihak kepolisian yang menyarankan penyelesaian masalah di tingkat keluarga. Dengan

demikian kekerasan dalam rumah tangga tidak dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dan akibatnya tidak akan, atau kurang berpeluang untuk dicatat dalam buku laporan resmi kejahatan.

15. Tidak adanya perlindungan keamanan terhadap saksi kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan hal itu pada pihak polisi.<sup>44</sup>

#### **4. Domestic Violence dalam perspektif kondisi korban.**

Ringkasan ciri-ciri korban yang mengalami kekerasan yang berlarut-larut<sup>45</sup>:

- memiliki ketergantungan secara ekonomi (terhadap suami)
- merasa takut untuk dicerai
- merasa tidak berdaya
- memiliki keyakinan bahwa suami adalah pemimpin keluarga
- memiliki keyakinan bahwa sikap suami akan berubah
- menganggap alasan pemicu kekerasan bersumber pada dirinya sendiri
- lebih mementingkan anak-anak dan citra keluarga
- perasaan malu/aib bila kasusnya diketahui orang lain
- menganggap perkawinan adalah suatu yang sacral dan sebaliknya perceraian adalah suatu kesalahan
- selama dianiaya berungkali korban tidak melawan, barulah pada titik dimana korban merasa tidak sanggup lagi, korban melawan mulai dari cara memaki, membalas melempar, memukul kembali sampai dengan melakukan pembunuhan sebagai suatu resistensi.

#### **5. Domestic Violence dalam perspektif Draft Rancangan undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

Dalam Draft Rancangan undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga, terlihat adanya prinsip-prinsip yang akan diperjuangkan yaitu :

---

<sup>44</sup> .Ratna Batara Munti, Op-cit,h.30-33.

<sup>45</sup> . Ibid.h.36

1. Prinsip bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilenyapkan.
2. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga : kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial.
3. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi antara anggota di dalam sebuah rumah tangga (suami istri, pembantu rumah tangga, anak, dan famili serta orang-orang yang tinggal dalam satu atap), terjadi antara mereka yang punya hubungan darah dan diantara mereka yang memiliki hubungan emosional (seperti mantan istri/suami).
4. Kewajiban masyarakat untuk melaporkan dan melindungi korban. Siapa saja yang menyaksikan, mendengar dan mengetahui peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, wajib memberikan perlindungan kepada korban dan wajib melaporkannya.
5. Kewajiban negara melindungi dan memberikan pelayanan kepada korban. Yakni wajib menyediakan pelayanan medis, krisis senter 24 jam, konseling bagi korban dan terapi bagi pelaku, tempat-tempat penjagaan anak, perlindungan hukum bagi saksi, bantuan hukum Cuma-cuma, dan aparat-aparat yang tanggap.
6. Kewajiban pengadilan dan aparat polisi untuk mencegah berlanjutnya kekerasan dalam rumah tangga. Pengadilan dapat mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara atau perintah pembatas gerak

sementara, tanpa perlu menunggu bukti-bukti terkumpul. Surat ini harus ditindaklanjuti secepatnya oleh aparat.

7. Adanya prosedur alternatif untuk mengajukan pengaduan. Tidak hanya korban, tetapi keluarga, teman, pekerja sosial, atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga-lembaga kesehatan/ sosial setempat, apabila tidak mungkin melaporkan secara langsung ke pihak kepolisian. Selanjutnya lembaga-lembaga tersebut berkewajiban untuk meneruskannya kepada pihak kepolisian mengenai adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga.
8. Memudahkan prosedur pembuktian. Pembuktian tidak hanya bisa merujuk pada hasil visum et repertum, akan tetapi laporan kondisi psikologis korban juga bisa jadi rujukan adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. Visum-visum ini bisa dikeluarkan oleh lembaga-lembaga sosial dan kesehatan yang telah diakreditasi oleh pemerintah setempat, untuk tidak dimonopoli oleh lembaga-lembaga tertentu saja, yang terpenting dimasukkan di dalam undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga nantinya tentunya bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang harus mencakup tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis, seksual dan ekonomis.



### **E.Tinjauan Terhadap Korban Tindak Kekerasan**

Berbicara mengenai tindak kekerasan, maka disini terkait apa yang dinamakan dengan "korban". Yang dimaksud dengan korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran (target) kejahatan <sup>46</sup>. Dalam Resolusi MU-PBB 40/34 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "korban" ialah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain dinyatakan, khususnya sewaktu menjelaskan "*Victim of Abuse of Power*", bahwa dalam pengertian "korban" termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional. Selanjutnya dikemukakan, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah di pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa

---

<sup>46</sup>. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h.78.

memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban. Sekiranya cukup layak istilah "korban" juga dapat mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban<sup>47</sup>. Pendapat lain mengatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Yang dimaksud mereka di sini dapat berarti : 1).korban perorangan atau individual (*viktimisasi primair*); 2).korban yang bukan perorangan, misalnya badan, organisasi, kelompok baik swasta maupun pemerintah<sup>48</sup>.

Dalam tesis ini berbicara mengenai korban maksudnya adalah "perlindungan terhadap korban". Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan perlindungan kepentingan, baik individu maupun masyarakat. Agar dapat tercapai dibutuhkan pedoman bertingkah laku yang disebut norma atau kaedah sosial. Kaedah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaedah sosial ini, hendak dicegah gangguan-gangguan kepentingan manusia, akan dapat

---

<sup>47</sup> . Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.54-55.

<sup>48</sup> . Arif Gosita, *Op-cit*, h.63

dihindarkan bentrokan antar kepentingan. Diharapkan kepentingan-kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>49</sup>

Masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Konggres PBB VII/ 1985 di Milan (tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of offenders*"), dikemukakan bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana ("*victim rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*")<sup>50</sup>.

Suatu hal yang tidak adil jika penegakan hukum pidana hanya memberikan perhatian pada si pelaku kejahatan (*offender*) sementara orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari suatu kejahatan tidak atau kurang mendapat perhatian. Hal ini akan bertentangan dengan tujuan dari diadakannya atau diciptakannya aturan hukum pidana yang bermaksud untuk memberikan perlindungan pada masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan.

KUHP yang berlaku saat ini tidak atau memberi perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi di dalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Kemungkinan adanya ganti rugi hanya ada dalam Pasal 14 c KUHP, yaitu sebagai salah satu syarat

---

<sup>49</sup> . Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996.h.4.

<sup>50</sup> . Barda Nawawi Arief, *Op-cit*, h.53

di dalam pidana bersyarat. Jadi ganti rugi bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, melainkan justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide dasar yang melatarbelakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender*), tidak berorientasi pada korban tindak pidana (*victim*).<sup>51</sup>

Pada proses peradilan pidana kerugian yang diderita korban, baik kerugian langsung yakni kerugian yang diakibatkan langsung oleh kejahatan maupun kerugian tidak langsung, yakni biaya yang harus mereka keluarkan untuk kerugian-kerugian fisik, psikis, sosial dan moral yang diakibatkan secara langsung dari kejahatan, tidak diperhatikan dan tidak menjadi skala prioritas oleh sistem peradilan pidana. Akibatnya, korban merasa terisolasi, tidak dibantu dan merasa kehilangan rasa solidaritas sosialnya.

Dengan demikian maka korban kejahatan pada dasarnya harus dilindungi. Mengapa demikian ? Menurut Muladi ada beberapa argumentasi<sup>52</sup> :

*Pertama*, proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian baik dalam arti umum maupun dalam arti konkrit. Dalam arti umum, proses

---

<sup>51</sup> . Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.h.57.

<sup>52</sup> . Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.h.176-177.

pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa baik "*poena*" maupun "*crimen*" harus ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya). Di sini terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada pihak lain.

*Kedua*, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*).

Yang pertama menyatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu bila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Yang disebut terakhir, menyatakan bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa

dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

*Ketiga*, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Perlu diketahui bahwa perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. perlindungan korban diartikan sebagai perlindungan untuk tidak menjadi korban tindak pidana, berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang;
- b. dapat juga diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyatuan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemulihan ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.<sup>53</sup>

Oleh karena itu dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban kejahatan, yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita si korban. Ternyata esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil atau penderitaan fisik saja melainkan juga bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simptom dari sindrom

---

<sup>53</sup> . Barda Nawawi Arief, Op-cit.h.56.

tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, etnisme, depresi, kesepian dan pelbagai penghindaran lainnya.<sup>54</sup>

Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni<sup>55</sup>:

1) model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*)

2) model pelayanan (*the services model*).

Pada model yang pertama, penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata.

Pada model pelayanan, diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat

---

<sup>54</sup> . Muladi, Op-cit.h.177.

<sup>55</sup> . Ibid.h.178

restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para aparat penegak hukum yang lain.

Dalam tesis ini yang dimaksud dengan korban hanya korban yang perorangan atau individual dan dibatasi pada perlindungan hukum terhadap perempuan atau istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 1 Ayat (4) Draft Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan dalam rumah Tangga, yang dimaksud dengan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah seseorang perempuan atau pihak-pihak lain yang ter subordinasi berdasarkan struktur keluarga yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam *Declaration on The Elimination of Violence against Woman* yang dikeluarkan PBB pada tahun 1993 atau Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, secara jelas dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi wanita yang merupakan korban terbanyak dari *domestic violence* mutlak dilakukan oleh negara, sebagaimana dinyatakan di bawah ini:

Pasal 4:

Negara harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlindung dibalik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan untuk menghindari tanggung jawab untuk mengharuskannya. Negara harus



meneruskan dengan cara-cara yang benar dan tidak menunda-nunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, dan untuk tujuan itu harus:<sup>56</sup>

- (a). Mempertimbangkan bagi yang belum melakukan, meratifikasi atau menerima konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau menolak keberatan-keberatan terhadap konvensi tersebut;
- (b). Menghentikan kebiasaan melakukan kekerasan terhadap perempuan;
- (c). Melakukan usaha-usaha secara terus-menerus untuk mencegah, mengusut, dan sesuai dengan perundang-undangan nasional, untuk menghukum para pelaku kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh negara maupun perseorangan;
- (d). Mengembangkan sanksi-sanksi hukum, sipil, ketenaga kerjaan dan administrative dalam perundang-undangan nasional untuk menghukum dan menindak kesalahan-kesalahan yang telah menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan, perempuan yang mengalami kekerasan harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh sanksi dan kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang mereka derita, yang dijamin oleh perundang-undangan nasional. Negara juga harus memberikan informasi kepada perempuan tentang hak-hak mereka dalam rangka memperjuangkan tuntutan melalui mekanisme tersebut;
- (e). Mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan rencana aksi tingkat nasional untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan atau untuk memasukkan ketentuan-ketentuan yang setuju ke dalam rencana-rencana yang telah ada, memperhitungkan sebaik-baiknya bentuk-bentuk kerjasama tertentu yang dapat disumbangkan organisasi-organisasi non pemerintah, utamanya yang mempunyai kepedulian terhadap masalah ini;
- (f). Mengembangkan secara menyeluruh pendekatan-pendekatan preventif dengan segala perangkat hukum, politik, administrasi dan budaya, guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, dan menjamin tidak terjadinya lagi pengorbanan perempuan akibat hukum yang tidak peka jender, praktek-praktek pemaksaan atau campur tangan lainnya;

---

<sup>56</sup> . Lampiran 2, Op-cit, h.390.

- (g).Memberikan jaminan atas perluasan secara maksimal kesempatan untuk mencapai sumber-sumber daya dan bila dipandang perlu memasukkannya ke dalam kerangka kerja sama internasional sehingga perempuan yang menjadi korban kekerasan dan bila dimungkinkan anak-anak mereka mendapatkan bantuan khusus, seperti rehabilitasi, bantuan pengasuhan dan pemeliharaan anak, peralatan, bimbingan, pelayanan kesehatan, dan sosial, fasilitas-fasilitas dan program-program termasuk struktur-struktur pendukung dan harus memberlakukan semua peraturan yang layak untuk meningkatkan keamanan serta rehabilitasi fisik maupun psikologis mereka;
- (h).Memasukkan dalam anggaran pemerintah sumberdaya yang mencukupi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
- (i).Menetapkan perangkat-perangkat peraturan yang menjamin bahwa para penegak hukum dan pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencegah, mengusut dan menghukum kekerasan terhadap perempuan dan memberi mereka pelatihan-pelatihan agar mereka peka akan arti pentingnya perempuan;
- (j).Mengadopsi perangkat peraturan yang layak, khususnya dalam bidang pendidikan, untuk memodifikasi pola-pola perilaku social dan budaya laki-laki dan perempuan dan menghilangkan prasangka-prasangka, praktek-praktek adat dan praktek-praktek lain atas dasar pemikiran inferioritas dan superioritas seksual dan stereotip peran laki-laki dan perempuan;
- (k).Mengembangkan penelitian, pengumpulan data dan mengkompilasi statistik, khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehubungan dengan luasnya perbedaan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong penelitian tentang sebab-sebab, sifat, kepentingan dan akibat-akibat dari kekerasan terhadap perempuan serta efektivitas penerapan peraturan-peraturan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan, data-data statistik dan temuan-temuan penelitian itu dilakukan secara terbuka;
- (l).Mengadopsi peraturan-peraturan yang bertujuan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, khususnya mereka yang rentan terhadap kekerasan;
- (m).Memasukkan dalam laporan-laporan sebagaimana yang dinyatakan oleh perangkat-perangkat hak asasi yang relevan yang dikeluarkan oleh PBB. Informasi yang berkaitan dengan

kekerasan terhadap perempuan dan langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan Deklarasi ini;

- (n).Mendorong pengembangan panduan-panduan untuk membantu pelaksanaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi ini;
- (o).Memperhatikan pentingnya peran gerakan perempuan dan organisasi-organisasi non pemerintah di seluruh dunia dalam rangka meningkatkan kesadaran dan mengurangi masalah kekerasan terhadap perempuan;
- (p).Memfasilitasi dan mempertinggi kinerja gerakan menjalin kerjasama dengan mereka pada tingkat local, nasional maupun regional;
- (q).Mendorong organisasi-organisasi antar pemerintah di tingkat regional yang menjadi anggota agar benar-benar memasukkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan ke dalam program-program mereka.

Dari Pernyataan Deklarasi di atas tampak bahwa bentuk perlindungan yang diberikan pada wanita tersebut tidak terbatas pada upaya kuratif saja seperti rehabilitasi, dan lain sebagainya tetapi juga tercakup upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Pertimbangan lebih lanjut adalah untuk melindungi generasi selanjutnya dari ancaman *domestic violence* karena anak-anak yang pernah menyaksikan tindak kekerasan yang terjadi di rumah mereka dimana hal itu dilakukan oleh anggota keluarga mereka, memiliki risiko mengalami penderitaan psikologis dan emosional, yang selanjutnya akan berpengaruh pada perkembangan mental anak-anak tersebut di kemudian hari.

Minimnya perlindungan hukum yang dirancang secara khusus untuk perempuan, antara lain mengakibatkan<sup>57</sup> :

- a. tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban;
- b. tidak adanya hak khusus yang diberikan pada korban tindak kekerasan terhadap perempuan;
- c. tidak adanya penghargaan pada korban tindak kekerasan terhadap perempuan;
- d. tidak adanya kompensasi untuk perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan;
- e. tidak adanya lembaga khusus yang secara nasional menangani masalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

#### **F. Pemahaman Tentang Kebijakan Hukum Pidana**

Terjadinya kejahatan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) di dalam masyarakat yang bersifat khusus, khas dan kompleks, perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya, di samping itu perlu ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif, dalam hal ini salah satunya adalah penanggulangan dengan sarana hukum pidana.

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan ini, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem

---

<sup>57</sup> . Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Dalam Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, PT.Alumni, Jakarta, 2000.h.82-83.

hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.<sup>58</sup>

### **Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris: "*Policy*" atau dalam bahasa Belanda: "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum-pen) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> . Dalam hal ini Marc Ancel mengatakan bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen yaitu : "*Criminology*", "*Criminal Law*", dan "*Penal Policy*". Selanjutnya Marc Ancel mengatakan bahwa "*Between the study of criminological factor on the one hand, and the legal technique on the other, there is the room for science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fractricidal strife, but as fellow-workers engaged in common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, and healtily progesve penal policy*", Lihat: Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.23-24.

<sup>59</sup> . Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999.h.10.

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".<sup>54</sup> Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu :1).pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan), 2).segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya), 3). cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijaksanaan.<sup>55</sup>

Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Memang perlu diakui, bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

---

<sup>54</sup> . Barda Nawawi Arief, Loc-Cit .h.27

<sup>55</sup> . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1997.h.780.

Selanjutnya menurut Sudarto "politik hukum" adalah : <sup>40</sup>

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.<sup>41</sup>

Dari definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja

---

<sup>40</sup> . Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adidya Bakti, Bandung, 1996, h.27.

<sup>41</sup> . Aloysius Wisnubroto, Op-cit. h.11

namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.<sup>42</sup>

Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.<sup>43</sup>

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formatif.

Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid.h.11

<sup>43</sup> Ibid.h. 11

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, Op-cit.h.29.



Sehingga dalam hal ini A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>45</sup>

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>46</sup>

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal, pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk menunjang dan mencapai "kesejahteraan sosial" (*social welfare*) dan

---

<sup>45</sup> Ibid.h.28

<sup>46</sup> Aloysius Wisnubroto, Op-cit.h.12.

“perlindungan sosial” (*social defence*). Dengan demikian, digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal dan sarana politik sosial, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SAAT INI DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA (*DOMESTIC VIOLENCE*)

###### A.1.Contoh-contoh Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (*domestic violence*).

Adapun contoh-contoh kasus yang dimaksud disini adalah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan (*domestic violence*) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tempat penulis mengadakan penelitian. Contoh-contoh kasusnya adalah sebagai berikut:

###### 1.1. Putusan Pengadilan Nomor:14/Pid/B/1991/PN.Yogyakarta<sup>1</sup>

###### a. Duduk Perkara:

Ag Bnd bin Skrn, laki-laki, umur 35 tahun, tempat lahir di Yogyakarta, tempat tinggal di Patehan Lor Nomor: 26 Kecamatan Kraton Kodya Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia, pendidikan SLTA, telah didakwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Pebruari 1991 NO: PDM.346/Yogya/1290, sebagai berikut:

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 1990 jam 09,00 WIB di rumahnya telah sengaja melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri yang bernama Ny.Suparjinah karena terdakwa merasa jengkel

---

<sup>1</sup> . Sumber, Register Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta.

dengan perbuatan istrinya yang sering bermain serong dengan laki-laki lain, disamping karena istrinya tidak memberi uang kepada terdakwa untuk bermain bilyard, terdakwa lalu mengambil sapu lidi (tebah, bhs.jawa) dan dipukulkan kepada istrinya mengenai bagian kepala belakang dan samping kepala, punggung dan seluruh badan, kemudian dengan tangan kosong muka istrinya dipukul lagi, selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa menendang dada istri sehingga istri terjatuh kemudian dengan membiarkan keadaan istri, terdakwa tidur, sedangkan istrinya (korban) dengan sisa tenaganya yang masih ada, pergi keluar rumah dan dengan naik taksi pergi ke rumah mertuanya (orang tua kandung terdakwa) di Gentan Yogyakarta, dan setibanya di rumah mertua, korban langsung jatuh pingsan dan oleh mertuanya kemudian korban dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban telah menderita luka-luka yaitu hidung berdarah, luka memar didada, pernah pingsan dengan kesimpulan penderita dengan gejala gegar otak, pendarahan hidung dan memar didada akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.Basuki pada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tanggal 12 Nopember 1990 NO:373/WS/MR/VIS/UM/II/90, dan karena perbuatan terdakwa tersebut Ny.Suparjinah di rawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan terhalang untuk melakukan pekerjaan . Setelah korban pulang dari rumah sakit, terdakwa menemui korban dan mengancam akan membunuh serta menyuruh korban agar mengajukan cerai ke Pengadilan Agama dengan ini berarti terdakwa sendiri yang telah melakukan penyelewengan sendiri dan menghendaki untuk kawin lagi.

**b. Dakwaan**

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 (ke 1) KUHP.

**c. Tuntutan Jaksa**

Jaksa selaku penuntut umum dalam tuntutan pidananya, memohon kepada Majelis Hakim, agar memberikan putusan sebagai berikut::

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ag Bnd bin Skrn selama 10 (sepuluh) bulan penjara.
2. Menyatakan barang bukti berupa satu ikat sapu lidi (tebah, bahasa jawa) dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menyatakan dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

d. Putusan Hakim:

Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana ini telah mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ag Bnd bin Skrn bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan biasa terhadap istri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 (ke 1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ag Bnd bin Skrn selama 10 (sepuluh) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa satu ikat sapu lidi (tebah, bahasa jawa ) dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah).

## 1.2. Putusan Pengadilan Nomor: 38/Pid/B/1996/P.N.Yogyakarta<sup>2</sup>

### a. Duduk Perkara

MC.Otg, tempat lahir Yogyakarta, umur 55 tahun, tanggal lahir 11 Januari 1940, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Bumijo Lor JT,I/1293 Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan jaga malam, pendidikan SMP tamat. Adapun uraian kejadiannya adalah : pada hari Selasa tanggal 26 September 1995 sekitar jam 10.00 terdakwa sedang tidur, sedangkan saat itu istri terdakwa (Ny.miatun) memecah es di dalam rumah dengan suara sampai menimbulkan getaran sehingga rumah dan atap seng rumah bergetar menimbulkan suara, lalu terdakwa menegur istrinya agar jangan terlalu ribut, sehingga terjadi perang mulut yang berakhir dengan terdakwa memukul istrinya dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian pinggul, pundak, leher serta hidung yang mengakibatkan istrinya mengalami luka-luka.

### b. Dakwaan

Perbuatan terdakwa diancam pidana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 (ke 1 ) KUHP.

### c. Tuntutan Jaksa

Jaksa selaku penuntut umum dalam tuntutan pidananya, memohon kepada Majelis Hakim, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap MC.Otg dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan.
2. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1,000 (seribu rupiah).

---

<sup>2</sup> . Sumber, Register Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta.

#### d. Putusan Hakim

Memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MC.Otg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana “penganiayaan terhadap istri sendiri”
2. Menjatuhkan pidana kepadanya karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).

#### **A.2.Analisis Terhadap Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**

##### **Dalam Rumah Tangga (*domestic violence*)**

Kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (seperti contoh pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta di atas) bersifat kompleks, khusus dan khas. Tindak kekerasan tersebut merupakan suatu permasalahan yang dihadapi Indonesia. Di satu pihak perangkat atau aturan hukum yang dipakai sebagai landasan atau pedoman untuk menyelesaikan atau menanggulangi tindak kekerasan tersebut belum memadai dan menggunakan ketentuan hukum secara umum, sedangkan dilain pihak aparat hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan untuk menyusun suatu undang-undang baru yang khusus menyangkut tindak

kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bukan merupakan sesuatu yang mudah dan memerlukan proses yang panjang, sementara kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga terus bermunculan di Indonesia sehingga perlu segera adanya penyelesaian.

Melihat kenyataan tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali mengoptimalkan operasionalisasi pasal-pasal yang ada dalam hukum positif saat ini (KUHP) dalam menyelesaikan masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu metode penafsiran (interpretasi) merupakan sarana yang amat penting dalam sistem hukum yang menempatkan pasal-pasal yang ada sebagai sumber hukum utamanya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka metode penafsiran tidak sekedar mengartikan rumusan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan atau mengkaitkannya dengan sifat perbuatan, namun juga mencari kesepadanan makna atau maksud yang terkandung dalam rumusan ketentuan tertentu dengan maksud atau tujuan dari perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan melihat putusan pengadilan di atas bisa disimpulkan bahwa, nampaknya kesadaran akan keadilan gender di Indonesia dipandang belum tumbuh sewajarnya meskipun konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi telah disahkan. Dalam hal ini termasuk aparat penegak hukum dipandang masih memiliki bias gender yang merugikan kaum perempuan, sebagaimana tergambar dalam kasus di atas, di



mana perempuan yang menjadi korban kekerasan suami mendapat perlakuan yang tidak adil, hal ini bisa terlihat pada hukuman (pidana penjara) yang tidak seimbang dengan kesalahan suami yang melakukan penganiayaan dibandingkan dengan penderitaan istri sebagai korban kekerasan seorang suami, tambahan si suami dipidana penjara, dan terhadap si istri tidak mendapatkan ganti kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban belum sesuai dengan harapan yang ada dalam konvensi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam keadaan semacam ini, sistem perlindungan hukum yang ada seharusnya mencakup juga sistem kompensasi yang berasal dari dana yang dikelola oleh pemerintah, akan tetapi apabila seorang suami yang melakukan *domestic violence* dituntut ke pengadilan dan suami tersebut dipersalahkan, maka ia akan dihukum juga untuk membayar kompensasi yang akan diambil sebagai restitusi terhadap dana yang telah dikeluarkan negara. Sistem ini akan mengakibatkan pihak istri dapat mengenyampingkan kesulitan ekonomi yang menghadang jika dia mengambil keputusan untuk menggunakan perlindungan hukum yang tersendiri dengan membawa persoalannya pada Sistem Peradilan Pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>. Gde Soedharta/Maruarar Siahaan, *Ancaman Hukuman Maksimal Bagi Pelaku (Usulan Perubahan Konkret Sistem Peradilan Pidana dari Perspektif Pengadilan dan Hakim)*

Sebagai gambaran perempuan menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga, dapat dikemukakan dari data yang dikumpulkan oleh pusat pendampingan dan pelayanan yang diakses oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Centre* di Yogyakarta seperti pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1**

**Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**

Bulan Januari-Juni 2002

KTG-KASUS	GUDEG NET	OUTREACH	SURAT	TATAP MUKA	TELP.	TOTAL
KDK				7	1	8
KDP	4	3	4	25	18	54
KTI		2	8	82	32	124
PEL-SEKS		1		1	1	3
PERKOSAAN		16		7	1	24
TOTAL	4	22	12	90	53	213

Sumber Data : Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 2002

---

dalam Chatarina Puramdani Hariti (ed), *Perubahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan, Jakarta, 2000. h. 33.

Keterangan:

KDK : Kekerasan Dalam Keluarga

KDP : Kekerasan Dalam Pacaran

KTI : Kekerasan Terhadap Istri

Pel-seks: Pelecehan Seksual

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa bentuk kekerasan yang paling dominan adalah KTI (Kekerasan Terhadap Istri). Adapun bentuk kekerasan yang dialami korban KTI sangat beragam yaitu, kekerasan seksual 9%, kekerasan fisik 21%, kekerasan emosional 40%, kekerasan ekonomi 30%. Hal ini perlu menjadi perhatian para pengambil kebijakan untuk segera menanggulangnya. Dari hasil wawancara dengan staf Rifka Annisa dikatakan bahwa mereka (korban) tersebut kemudian ada yang menyelesaikan masalahnya secara damai dan ada yang kemudian diteruskan melalui proses pengadilan.<sup>4</sup>

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 % dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang dominan adalah kekerasan dalam

---

<sup>4</sup>. Wawancara dengan (Wening) salah satu Staf Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 6 Agustus 2002.

rumah tangga atau kekerasan domestik misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan. Mengenai kekerasan seksual, LSM perempuan Kalyanamitra dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa setiap lima jam terjadi satu kasus perkosaan.<sup>5</sup>

Tindak kekerasan yang berbahaya tetapi kurang terdeteksi adalah kekerasan terhadap istri. Padahal kekerasan terhadap istri adalah bahaya besar bagi perempuan dibanding bahaya kekerasan di jalanan. Di Amerika Serikat misalnya, KTI merupakan bahaya yang sangat besar, karena data statistik di sana menunjukkan bahwa setiap 9 menit perempuan menjadi korban kekerasan fisik, dan 25% perempuan yang terbunuh adalah dibunuh oleh pasangan lelakinya. Disebutkan juga bahwa antara 1,5 hingga 3 juta anak menyaksikan KTI dalam keluarganya. Riset yang dilakukan pemerintah Kanada menunjukkan bahwa setidaknya 1 dari 10 perempuan yang berumah tangga, mengalami kekerasan dari suami (pasangannya). Data lain menunjukkan bahwa 59% perempuan di Jepang, 80% di Pakistan, 42% perempuan di Kenya, adalah korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Contoh lain dapat dilihat dalam data statistik yang tercatat di Mitra Perempuan *Women's Crisis Centre*<sup>7</sup> sebagai lembaga pelayanan yang

---

<sup>5</sup> . [WWW.mw.nl/ranesi/html/kekerasan\\_perempuan](http://WWW.mw.nl/ranesi/html/kekerasan_perempuan).

<sup>6</sup> . [WWW.mw.nl](http://WWW.mw.nl)

<sup>7</sup> . Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Ibid.h.100-101.

mendampingi perempuan dengan memberi bantuan bagi perempuan yang mengalami kekerasan khususnya kekerasan domestik, dapat dimanfaatkan untuk memahami kebutuhan perempuan dalam menghadapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Rata-rata terjadi peningkatan 60 kasus kekerasan yang diterima pengaduannya oleh Mitra perempuan setiap semester. Catatan data tahun 1998 menunjukkan bahwa dari 98 kasus kekerasan domestik, perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan yang cukup bervariasi jenisnya dari kekerasan yang menderitakan atau tekanan fisik, secara emosional/psikologis, seksual bahkan juga secara verbal (dengan kata-kata), dan secara ekonomi.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, kurang terekspos terutama yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat Indonesia yang mentabukan persoalan dalam rumah sebagai urusan dalam rumah tangga itu sendiri, sehingga enggan untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut kepada aparat.

Adanya *non-reporting* ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:

- (a). si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis;
- (b). si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri;
- (c). si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya si pelaku;

- (d). si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media masa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka;
- (e). si korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya);
- (f). lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor;
- (g). keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum;
- (h). ketaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.<sup>8</sup>

Menurut laporan Amerika Serikat kepada Komite PBB untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tahun 1998, bahwa kekerasan terhadap wanita tetap tidak tercatat dengan baik. Namun pemerintah mengakui adanya masalah keluarga di masyarakat yang makin gawat karena perubahan sosial akibat urbanisasi yang cepat. Perkosaan oleh suami atas istri tidak dianggap sebagai kejahatan menurut undang-undang. Meskipun kelompok-kelompok wanita berusaha mengubah undang-undang ini, mereka belum memperoleh kemajuan berarti. Norma-norma budaya menetapkan bahwa masalah antara suami dan istri adalah urusan pribadi, dan kekerasan di rumah terhadap wanita jarang dilaporkan. Meskipun polisi dapat menuntut karena memukul istri, sikap

---

<sup>8</sup> .Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Dalam Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, PT.Alumni, Jakarta, 2000, h.82-83.

masyarakat pada umumnya membuat polisi cenderung tidak melakukan hal itu. Akan tetapi menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya, polisi sudah menjadi agak lebih responsif terhadap keluhan kekerasan di dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Tidak dilaporkannya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, bisa dilihat juga pada hasil kesimpulan dalam Suara Apik sebagai berikut:<sup>10</sup> dalam konteks budaya patriarkhi, para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi berlapis-lapis hambatan untuk mengakses hukum, seperti:

1. tidak mudah melaporkan kasusnya karena berarti membuka aib keluarga.
2. ragu melaporkan karena bisa kadi ia yang dipersalahkan karena tidak becus mengurus suami/keluarga, karena kata orang "tidak asa asap kalau tidak ada api"
3. takut melaporkan karena bisa memperparah kekerasan yang dialami. Suami semakin gelap mata kalau mengetahui istrinya berani melaporkan dirinya, yang berarti mencemarkan status sosialnya sebagai kepala keluarga.
4. khawatir kalau melapor, ia akan diceraikan dan menjadi janda. Bagaimana ia kelak dan bagaimana anak-anak?
5. Berani melapor ke polisi tapi ternyata respon aparat tidak serius karena menganggapnya sebagai masalah privat. Tidak semua kepolisian ada RPK-nya.
6. Berani melapor, direspon oleh polwan di RPK, tapi ternyata sulit untuk membuktikan kekerasan yang dialaminya (terbentur KUHAP).
7. Berani melapor dan ada bukti kuat, tetapi ancamannya pidana penjara. Berarti suami akan dikurung. Bagaimana nafkah keluarga?sekolah anak-anak?siapa yang akan menjamin biayanya? Sebab selama ini baik sistem sosial dan hukum telah membuat ia (istri) tergantung secara ekonomis terhadap sang kepala rumah tangga.

---

<sup>9</sup>. Internet\HAM Wanita

<sup>10</sup>. Suara Apik, Edisi 10 Tahun 2000, LBH-APIK, Jakarta.h.3

### **A.3.Respon Hukum Terhadap Masalah *Domestic Violence***

Pembahasan dalam respon hukum terhadap masalah *domestic violence* disini adalah mengenai aturan atau ketentuan mana dalam perundang-undangan hukum pidana positif yang ada di Indonesia pada saat ini (KUHP) yang dimungkinkan untuk dapat diterapkan pada tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan bagaimana relevansinya serta apa kelemahannya yang berhubungan dengan :

- Perbuatan atau tindak pidana;
- Sanksi;
- Perlindungan korban.

3.a. Perbuatan atau tindak pidana, sanksi dan perlindungan korban dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sekalipun pada saat ini di Indonesia belum ada ketentuan yang secara khusus memuat ketentuan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*), namun aparat penegak hukum, khususnya hakim dituntut untuk mampu menyelesaikan kasus-kasus *domestic violence* yang muncul.

Membahas mengenai respon hukum terhadap masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*), maka pertama kali akan menyangkut masalah definisi atau



istilah kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Hal ini tidak pernah dikenal dalam KUHP Indonesia. Istilah tersebut muncul sekitar tahun 1995, didapat dari terjemahan *domestic violence* yang digunakan dalam UU yang ada di Malaysia, atau *domestic abuse* yang digunakan dalam UU yang ada pada Negara Bagian Minnessota-AS. Sedangkan yang ada dalam KUHP hanya definisi dari melakukan kekerasan.<sup>11</sup>

Sampai saat ini Hukum Positif di Indonesia (KUHP) tidak atau belum secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang merespon persoalan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, perbuatan atau tindak pidana tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) memang tidak dikenal dalam KUHP Indonesia atau dapat juga dikatakan bahwa tidak ada istilah delik kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, sehingga secara otomatis masalah perbuatan atau tindak pidana, sanksi maupun perlindungan korban tidak ada. Kebijakan selama ini yang dapat diterapkan atau dipakai sebagai landasan atau aturan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah mengacu pada Pasal 351-356 KUHP tentang penganiayaan (lihat seperti contoh kasus di atas).

---

<sup>11</sup> . Suara APIK, LBH-APIK, 1999.

KUHP memberikan pengertian tentang penganiayaan, seperti ditentukan dalam Pasal 351 (4), bahwa "dengan penganiayaan disamakan merusak keselamatan orang dengan sengaja". Sedangkan Yurisprudensi yang dikutip R.Susilo, penganiayaan diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pain), luka dan sengaja merusak kesehatan.<sup>12</sup>

KUHP menentukan bahwa, pelaku penganiayaan dapat dipidana penjara atau denda. Pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 (penganiayaan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 353 (penganiayaan yang direncanakan), Pasal 354 (penganiayaan berat), Pasal 355 (penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu) dan penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah, ibu, suami, istri, atau anaknya dimana kepada pelakunya hukuman ditambah dengan sepertiga dari ancaman hukuman pasal penganiayaan yang lain (Pasal 356).

Rumusan Pasal 351 KUHP:<sup>13</sup>

- (1). Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2). Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3). Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4). Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

---

<sup>12</sup>. Tabloid Nova No.731/XV Tanggal 3 Maret 2002.

<sup>13</sup>. R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya, 1980.h.366

- (5). Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.

Pasal 352 KUHP:<sup>14</sup>

- (1). Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pidana itu dapat ditambah sepertiganya bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintahnya.
- (2). Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.

Pasal 353 KUHP:<sup>15</sup>

- (1). Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2). Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3). Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 354 KUHP:<sup>16</sup>

- (1). Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2). Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

---

<sup>14</sup>. Ibid.h.367

<sup>15</sup>. Ibid.h.368

<sup>16</sup>. Ibid.h.369

Pasal 355 KUHP:<sup>17</sup>

- (1). Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana selama-lamanya dua belas tahun.
- (2). Jika Perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 356 KUHP:<sup>18</sup>

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351,353,354 dan 355 dapat ditambah sepertiganya:

- Ke-1.bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- Ke-2.jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri, ketika atau karena pegawai itu menjalankan jabatannya secara sah;
- Ke-3.jikalau kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang dapat merusak nyawa atau kesehatan orang.

Ketentuan-ketentuan di atas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga tetapi setidaknya dapat digunakan untuk melaporkan para pelaku ke aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai penyidik.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas, tampaknya KUHP tidak mengenal dan mengakui "*violence based gender*" (kekerasan berdasarkan gender) . Hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban yang pada

---

<sup>17</sup> . Ibid.h.369

<sup>18</sup> . Ibid.h.370

prinsipnya korbannya adalah perempuan. Tidak adanya hukuman minimal, hanya maksimal (12 tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 356, sedangkan hukuman minimal bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan sangat perlu ditetapkan. KHUP tidak memberikan alternatif sanksi lain karena dianggap akan terjadi disintegrasi keluarga seperti ganti rugi, kompensasi, dan perintah perlindungan.

Sekalipun ada pasal-pasal yang bisa menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam prakteknya hal ini sulit diterapkan. Adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa persoalan keluarga "aib" untuk diceritakan ke pihak luar, membuat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan. Kalaupun seandainya dilakukan upaya hukum, seringkali persoalan kekerasan dalam rumah tangga berakhir pada proses perdata (perceraian), atau dengan kata lain tidak berlanjut ke proses pengadilan pidana. Dan seandainya pun akan dilakukan sampai ke proses pengadilan, tidak jarang kasus kekerasan dalam rumah tangga berguguran di tingkat kepolisian. Data pendampingan kasus kekerasan di LBH-APIK menunjukkan betapa tidak responsifnya para aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti laporan kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Baik aparat di tingkat kepolisian, jaksa maupun hakim tidak memiliki sensitifitas gender.

Sikap aparat ini disisi lain juga di dukung oleh budaya masyarakat yang lebih menekankan pada ideology harmonisasi keluarga.<sup>19</sup>

Dengan adanya deskripsi tentang eksistensi dan relevansi dari pasal-pasal KUHP yang dapat diterapkan atau dipakai sebagai landasan atau aturan untuk menyelesaikan kasus-kasus (seperti sudah penulis bahas di atas) kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) pada saat ini, maka akan nampak bahwa operasionalisasi pasal-pasal dalam KUHP belum optimal. Operasionalisasi hanya berkisar antara ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan fisik dan memutus perkara saja.

Persoalan yang menyebabkan tidak terlihatnya perlindungan hukum ketika menghadapi kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan. Pengertian perlindungan maksudnya dari merumuskan definisi tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi korban dan saksi kejahatan tersebut. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan mengenai hal pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku (hukum materiil) melainkan juga mengatur tentang proses

---

<sup>19</sup> . Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan*, LBH-APIK, Jakarta, 2000.h.17

tuntutan hukumnya (hukum formil/acara) serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban.<sup>20</sup>

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, adapun Kebijakan legislatif mengenai perlindungan korban menurut hukum pidana saat ini sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Hukum Pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *"in abstracto"* dan secara *"tidak langsung"*;
2. Perlindungan korban secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
3. Ada empat kemungkinan pemberian ganti rugi kepada korban dalam perkara pidana yaitu:
  - a. pemberian ganti rugi sebagai *"syarat khusus"* dalam pidana bersyarat (KUHP);
  - b. memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi sebagai *"tindakan tata tertib"* (Undang-undang NO.7 Drt.1955);
  - c. pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana tambahan (Undang-undang NO.3/1971);
  - d. penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam proses penggabungan gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (KUHP).

3.b. Kelemahan-kelemahan mendasar dalam pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) saat ini.

---

<sup>20</sup>.Rita Serena Kolibonso, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Op-cit.103.

<sup>21</sup>.Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.h.58.

1. KUHP tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideology harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat penegak hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat.

2. Aturan-aturan yang tertuang dalam KUHP semata-mata hanya ditujukan kepada kekerasan fisik, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 89 dan 90, dan ada pasal yang dapat menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), namun penggunaan pasal-pasal ini sangat terbatas karena hanya menunjuk pada kekerasan fisik semata-mata, pasal-pasal tersebut adalah Pasal 351 jo 356 KUHP.
3. Tidak adanya batas minimum dalam pemberian hukuman, sehingga seringkali hukuman yang diterapkan tidak sesuai dengan harapan si korban.

Sekalipun pidana yang dapat dijatuhkan antara 2 tahun sampai 12 tahun penjara bagi pelaku penganiayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 sampai 356 KUHP di atas, namun pada kenyatannya banyak pelaku tindak pidana tersebut dihukum sangat rendah (seperti contoh putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta di atas) yakni dalam



hitungan bulan. Hal ini dilatarbelakangi oleh persepsi aparat penegak hukum (hakim dan jaksa) yang cenderung menekankan pada konsep harmoni dalam keluarga. Ditambah lagi, tidak adanya aturan hukuman minimum yang akhirnya menjadikan peluang bagi hakim maupun jaksa untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan persepsi yang bias itu. Jaksa pada dasarnya tidak lagi mewakili kepentingan korban, tetapi lebih sebagai instrumen dari budaya patriarki yang terwujud pada sikap tidak responsif terhadap kepentingan korban (perempuan) yang notabene diwakilinya.

4. Cara penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan ini yang dianggap sama dengan kejahatan atau pelanggaran pada umumnya.

Para korban diharapkan untuk melapor ke polisi dengan membawa bukti-bukti yang cukup. Bahkan jika bukti dianggap tidak cukup atau tidak sempurna (misalnya tidak penetrasi dalam kasus perkosaan) maka peristiwanya dianggap sebagai kejahatan yang sebab-sebabnya "dapat diterima" (*acceptable cause*). Aspek mediolegal dalam masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian yang juga memperburuk keadaan khususnya yang berkenaan dengan dilemma yang ada antara etik kedokteran dan prosedur serta bukti-bukti yuridis yang harus dimiliki oleh korban.

5. Hanya mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam bentuk pidana penjara atau denda.

Tidak ada sistem pengaturan tindakan hukum yang lain, misalnya seperti bentuk perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak sementara yang dapat dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku melangsungkan kekerasan dalam rumah tangga atau penyediaan bentuk-bentuk terapi atau konseling yang dapat diwajibkan atas pelaku. Minimnya pengaturan sanksi dalam KUHP justru pada akhirnya menjadi dilemma bagi perempuan, karena hukum dan budaya telah memposisikan dirinya tergantung secara ekonomis terhadap suaminya, maka tidaklah terlalu mengejutkan jika lebih banyak perempuan memilih diam ketika menerima kekerasan dalam rumah tangga dari pada menuntutnya ke pengadilan.

Dengan melihat kelemahan-kelemahan yang ada dalam KUHP sekarang ini, maka kondisi di atas sangat bertentangan dengan HAM, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Baik yang dilakukan di rumah tangga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapus sesuai dengan Konvensi PBB yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1984 dan dikuatkan oleh Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta Indonesia yang mendasarkan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 .

Berdasarkan dasar pemikiran di atas, maka sudah saatnya perlu disusun peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan memperhatikan berbagai situasi perempuan dan segala kepentingannya. Dimana upaya pembaharuan hukum berkenan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan ini sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaharuan hukum yang telah ditetapkan dalam GBHN. Salah satu arah kebijakan pembangunan di bidang hukum adalah “menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dengan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”.

## **B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA (*DOMESTIC VIOLENCE*) DI MASA MENDATANG.**

### **B.1. Pengaturan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*) Dalam Konsep KUHP.**

Berikut ini penulis akan memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana formulasi Konsep Rancangan KUHP Baru (1999-2000), khususnya dalam mengantisipasi dan menanggulangi munculnya delik kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Setelah mengamati secara seksama seluruh naskah rancangan KUHP (baru) yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU-KUHP 1999/2000, diantara keseluruhan pasal-pasal yang berjumlah 647 pasal, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Seperti halnya KUHP (lama) masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga diinterpretasikan dalam Bab XXI tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

Secara keseluruhan aturan yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 159 Konsep KHUP memberi arti : "Kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang-orang pingsan atau tidak berdaya". Sedangkan ancaman kekerasan adalah suatu

hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam (Pasal 160 Konsep KUHP). Luka berat terdapat dalam Pasal 175 Konsep KUHP.

Dengan melihat rumusan pasal-pasal di atas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa apabila dibandingkan dengan KUHP sekarang yaitu Pasal 89 dan 90 KUHP, maka rumusan dalam Konsep KUHP yang mengatur tentang kekerasan sudah ada kemajuan, hal ini terlihat adanya tambahan 1 pasal dalam Konsep KUHP (Pasal 160) yang menyebutkan adanya ancaman kekerasan.

2. Apabila dibaca secara seksama, maka kalau terjadi atau muncul kasus mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka pasal yang dapat diterapkan sebagai landasan atau aturan adalah Pasal 484, 486, dan 487 Konsep KUHP.

Adapun rumusan Pasal 484 Konsep KUHP:<sup>22</sup>

- (1). Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan paling sedikit 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori IV dan paling sedikit Kategori III.
- (2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

---

<sup>22</sup>. Konsep KUHP 1999-2000, h.185

- (4). Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 486 Konsep KUHP:<sup>23</sup>

- (1). Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 487 Konsep KUHP:<sup>24</sup>

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, dan Pasal 486, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) jika tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya;
- b. terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; atau
- c. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Dengan melihat rumusan pasal-pasal di atas, maka dapat disimpulkan sementara, bahwa rumusan dalam Konsep KUHP tersebut ada kemajuan terutama dalam Pasal 487 apabila dibandingkan dengan Pasal 356 KUHP, sebab dalam Konsep KUHP Pasal 487 ditambah kata "suami" (lihat Pasal 356 KUHP).

Setelah melihat rumusan-rumusan pasal yang dapat diterapkan untuk menjerat seorang pelaku tindak kekerasan dalam rumah

---

<sup>23</sup> . Ibid.h.186

<sup>24</sup> . Ibid.h.186

tangga, maka rumusan-rumusan pasal dalam Konsep KUHP bisa dikatakan masih bias gender atau masih mengandung kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Dalam Konsep KUHP tidak mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) secara khusus.
2. Konsep KUHP hanya mengatur secara terbatas ruang lingkup kekerasan yaitu terbatas pada kekerasan fisik saja.
3. Konsep KUHP tidak mengatur hak-hak korban, layanan-layanan darurat bagi korban serta kompensasi.

Dengan demikian maka untuk sementara dapat disimpulkan bahwa permasalahan untuk menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dengan model formulasi dalam Konsep KHUP (Baru), belum semuanya dapat terpecahkan.

Sehubungan dengan masih terdapatnya kekurangan pada formulasi delik dalam rangka menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut, maka perlu adanya pemikiran lebih lanjut guna mengupayakan rumusan atau model pengaturan yang lebih baik.

## **B.2. Gambaran Kebijakan Hukum Pidana di Berbagai Negara Asing**

Dalam pembahasan terdahulu nampak bahwa sekalipun perundang-undangan hukum pidana positif di Indonesia dengan metode pendekatan penafsiran dapat diterapkan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*), namun dalam banyak hal dijumpai adanya kelemahan-kelemahan, sehingga guna menjamin adanya kepastian hukum perlu adanya kebijakan legislatif untuk mewujudkan perundang-undangan hukum pidana yang mampu menjangkau berbagai bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga secara tepat. Oleh sebab itu disamping pentingnya kajian-kajian terhadap kebijakan penerapan undang-undang hukum pidana positif yang ada pada saat ini terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu dikaji secara mendalam pemikiran untuk mengadakan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam rangka menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan perkembangan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) di masa mendatang.

Berkaitan dengan kompleksitas dan rumitnya permasalahan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, maka langkah untuk mengadakan kebijakan legislatif tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang mudah, mengingat sulitnya



merumuskan sanksi karena berkaitan dengan pelaku sebagai orang yang terdekat dengan korban.

Peraturan-peraturan kekerasan dalam rumah tangga dari negara-negara yang telah memiliki peraturan tersendiri seperti negara Minnesota-AS, New Zealand, Philipina, Turki, dan Malaysia, sudah seharusnya diketahui. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui metode perbandingan hukum. Hal tersebut disebabkan karena akan dapat memberikan manfaat lebih lanjut yaitu membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri (Prof.Sudarto) dan penting dalam rangka pengembangan hukum nasional sendiri (Rene David dan Brierly)<sup>25</sup>

Pengaturan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) di berbagai negara tidaklah sama (bervariasi). Hal ini tentu saja berkaitan dengan perbedaan kebijakan masing-masing negara, terutama berkaitan dengan perbedaan tradisi atau sistem hukum masing-masing negara.

Berdasarkan asumsi keanekaragaman pengaturan mengenai *domestic violence* di berbagai negara tersebut, maka perlu kiranya diadakan kajian perbandingan hukum guna mengetahui bagaimana model pengaturan, perumusan delik, penetapan sanksi . Dari kajian yang bersifat yuridis komparatif tersebut, selanjutnya dipergunakan sebagai

---

<sup>25</sup> . Lihat Dalam Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1998.h.17.

dasar untuk mengkaji bagaimana sebaiknya model yang dipergunakan untuk merumuskan delik, menetapkan sanksi dan perlindungan korban *domestic violence* dalam perundang-undangan hukum pidana di Indonesia di masa mendatang.

Berikut ini penulis akan memaparkan secara sekilas negara-negara asing yang telah mempunyai *domestic violence act*.

Masalah-masalah yang hendak dibandingkan adalah mengenai definisi kekerasan, lingkup rumah tangga atau keluarga, sanksi, perlindungan korban dan kompensasi.

#### 1. Minnesota

##### a. Definisi Kekerasan

Definisi kekerasan dalam rumah tangga dalam UU dari Minnesota, kurang terperinci, sebab tidak disebut atau dibedakan dengan jelas bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, disana hanya disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yaitu perbuatan yang dilakukan antara anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga, berupa:

1. kerugian fisik, luka-luka jasmani akibat adanya penyerangan;
2. menderita ketakutan atas kejahatan atau gangguan fisik yang datang secara tiba-tiba, mendapat luka-luka jasmaniah akibat adanya penyerangan, atau;
3. ancaman-ancaman teror atau tindakan seksual kriminal sesuai dengan pasal-pasal dalam UU lain.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> . Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kerja sama antara Lembaga Bantuan Hukum, Advokasi Perempuan Indonesia untuk keadilan (LBH-APIK) dan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2000.h.21.

Apabila melihat definisi di atas, maka bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi hanya terbatas pada kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan ancaman.

b. Lingkup Rumah tangga atau keluarga

Sedangkan definisi tentang arti dari keluarga atau rumah tangga dalam UU dari Negara Bagian Minnesota terlalu luas.

Ada 7 kategori seseorang sebagai anggota rumah tangga: <sup>27</sup>

1. suami istri dan bekas suami istri;
2. orang tua dan anak;
3. orang-orang yang mempunyai hubungan darah;
4. seseorang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang pernah tinggal bersama di waktu yang lalu;
5. orang yang sudah mempunyai anak dari hasil kebersamaan itu, tanpa dibedakan apakah mereka sudah menikah atau hanya tinggal bersama pada waktu tertentu;
6. seorang laki-laki atau perempuan, jika sang perempuan hamil dan lelaki itu diduga keras sebagai ayah dari bayi itu, tanpa membedakan apakah mereka sudah menikah atau hanya tinggal bersama pada waktu tertentu;
7. orang-orang yang terlibat dalam hubungan cinta yang serius atau hubungan seksual.

c. Sanksi

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan sudah memadai, karena adanya pidana minimum, pembayaran denda, sanksi bagi residivis, pencabutan hak, hal ini terlihat dalam:

---

<sup>27</sup>. Ibid.h.22

- a. Pemberian sanksi kepada seseorang yang melanggar perintah perlindungan.
- b. Pelanggaran perintah perlindungan dikategorikan sebagai perbuatan pidana ringan, ada pidana minimumnya (3 hari penjara) dan mengikuti konseling atau aktivitas lain yang diperintahkan oleh pengadilan.
- c. Bila perbuatan pidana ringan tersebut dilakukan dengan sengaja- 10 hari penjara.
- d. Bila seseorang yang bersalah atas perbuatan pidana berat dapat dihukum penjara, tidak lebih dari 5 tahun atau membayar denda tidak lebih dari 10.000 dollar atau kedua-duanya.
- e. Sanksi bagi residivis.
- f. Larangan tersangka menggunakan senjata api maksimum 3 tahun atau seumur hidup kalau melanggar merupakan pelanggaran atas pidana ringan yang disengaja.
- g. Bila pelaku pada saat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai senjata api, bisa dicabut kepemilikannya.<sup>28</sup>

#### d. Perlindungan korban

Ternyata pengaturan dalam perlindungan korban terdiri dari kewajiban masyarakat dan negara.

- Masyarakat,

Kewajiban masyarakat dalam memberikan perlindungan tidak diatur secara eksplisit, tetapi hanya ada pengaturan tentang penanganan oleh pelayanan swasta.

- Negara

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, dilimpahkan kepada pihak pengadilan dan polisi.

---

<sup>28</sup> . Ibid.h.25

Perintah perlindungan yang diberikan oleh pengadilan dapat dikatakan sangat memadai untuk melindungi korban, sebagaimana yang tercantum dalam bagian 6 sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) mengendalikan pihak tersangka
- 2) melarang tersangka masuk ke tempat tinggal pemohon
- 3) menjauhkan tersangka
- 4) memberitahukan pemeliharaan/kunjungan sementara untuk anak
- 5) pengadilan menyediakan dukungan sementara dan mengeluarkan surat perintah pemotongan pajak penghasilan
- 6) menyediakan konseling/pelayanan sosial
- 7) memerintahkan pelaku untuk partisipasi dalam penyembuhan/perawatan pelayanan konseling
- 8) memberi izin penggunaan harta dan mengekang kedua pihak dari pemindahan harta benda, dan lain-lain
- 9) membatasi/melarang pelaku mendekati tempat kerja pemohon
- 10) memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada pemohon
- 11) asuransi
  - a) memberikan perintah bentuk bantuan lain yang diperlukan, misalnya petunjuk perintah terhadap polisi, dll
  - b) bantuan diberikan tidak lebih dari setahun
  - c) bantuan tidak dapat ditambah atau diubah dalam suatu tindakan hukum untuk kasus perceraian, kecuali kalau pengadilan mendengar adanya mosi untuk perbaikan perintah perlindungan, tindakan hukum perceraian, dan mosi untuk mengubah perintah perlindungan harus dikeluarkan secara bersama-sama
  - d) perintah bantuan tidak dapat dibatalkan dengan adanya hak pelaku untuk memasuki tempat tinggal pemohon
- 12e) jika proses perceraian ditunda, maka salinan surat perintah perlindungan diberikan kepada hakim yang menangani kasus perceraian
- 12f) perintah ganti rugi melalui pertimbangan perdata.

#### e. Kompensasi

Pemberian kompensasi (ganti rugi) yang cukup memadai, seperti:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> . Ibid.h.24

<sup>30</sup> . Ibid.h.27

- Kesakitan dan penderitaan atau kecederaan baik fisik maupun mental;
- Biaya perawatan dan pengobatan sampai sembuh (kembali normal);
- Segala pendapatan atau keuntungan yang sedianya dapat diperoleh si korban;
- Segala kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan adanya kekerasan;
- Segala biaya kehidupan keluarga yang menjadi tanggungjawab korban yang tidak dapat dikelola korban akibat adanya kekerasan, mencakup: sewa rumah (cicilan rumah) atau pemeliharaan rumah; uang transport; dana sosial.

## 2. New Zealand-*Domestic Violence Act* 1995

Undang-undang ini bernama New Zealand-*Domestic Violence Act* 1995.

### a. Definisi Kekerasan

Definisi tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam *Domestic violence act* dari New Zealand diperinci dengan jelas dengan menyebut bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Adapun definisi tersebut terdapat dalam :

Sections 3. Meaning of "*domestic violence*".<sup>31</sup>

1. In this Act, "*domestic violence*", in relation to any person, means violence against that person by any other person with whom that person is, or has been, in a domestic relationship.
2. In this section, "violence" means:
  - a. Physical abuse;
  - b. Sexual abuse

---

<sup>31</sup> . [WWW.New Zealand Domestic Violence Act, Yahoo.com](http://WWW.New Zealand Domestic Violence Act, Yahoo.com)

- c. Psychological abuse, including, but not limited to,
  - Intimidation;
  - Harassment;
  - Damage to property;
  - Threats of physical abuse, sexual abuse, or psychological abuse.
  - In relation to a child, abuse of kind the kind set out in subsection (3) of this section.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3, definisi kekerasan adalah kekerasan terhadap seseorang oleh orang lain yang mana orang tersebut masuk dalam hubungan rumah tangga. "*Violence*" (kekerasan) dalam Undang-undang ini meliputi; kekerasan fisik, seksual, psikologi, tetapi tidak dibatasi pada : intimidasi, pelecehan, merusak harta benda, ancaman fisik, seksual atau merusak psikologi.

b. Lingkup Rumah tangga atau keluarga

Adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut UU ini sangat membingungkan dan cakupannya sangat luas sekali, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 (1) dari UU ini yaitu :<sup>32</sup>

(1) Untuk tujuan UU ini, seseorang adalah dalam suatu hubungan rumah tangga dengan yang lain jika seseorang itu adalah : (a) pasangan dari orang lain, atau (b) anggota keluarga dari yang lain, (c) secara kebiasaan merupakan bagian dari rumah tangga dengan orang lain, atau (d) mempunyai hubungan dekat dengan orang lain.

---

<sup>32</sup> . Op-cit.h.29

### c. Sanksi

Sanksi tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, tetapi dalam undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kekerasan rumah tangga dengan sanksi pidana penjara, disamping itu juga dengan sanksi perdata berupa ganti rugi yang meliputi perhitungan, kesakitan dan penderitaan korban, biaya perawatan medis, harta benda yang diambil, dirusak atau dihancurkan, biaya-biaya lain yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, biaya yang diperlakukan sebelum tinggal di penginapan atau shelter, dan biaya transportasi dan pemindahan.<sup>33</sup>

### d. Perlindungan korban

Berbeda dengan Minnesota, perlindungan korban yang didapat dari masyarakat atau kewajiban masyarakat tidak diatur secara tegas. Sedangkan kewajiban perlindungan dari negara didelegasikan kepada pengadilan diantaranya adalah:

- a. tata cara mengajukan permohonan perlindungan
- b. kekuasaan untuk mengeluarkan perintah perlindungan oleh pengadilan
- c. kondisi-konsisi standar yang dapat dimintakan perintah perlindungan
- d. larangan-larangan bagi pelaku.

---

<sup>33</sup>. Ibid.h.35



#### e. Kompensasi

Sedangkan tentang kompensasi tidak diatur secara tegas dalam UU New Zealand ini, dapat disimpulkan <sup>34</sup> bahwa dari aturan yang ada kekerasan dalam rumah tangga termasuk kategori kejahatan, maka pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini akan dikenakan sanksi pidana dan perdata berupa ganti rugi (seperti terlihat pada halaman 123 diatas).

### 3. Filipina

#### a. Definisi Kekerasan

Sebenarnya Filipina tidak mempunyai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di Filipina mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang dinamakan Undang-undang Republik Nomor 8353 atau UU Anti Perkosaan Tahun 1997, jadi dengan demikian secara eksplisit definisi kekerasan dalam rumah tangga tidak dicantumkan dalam UU ini.

Bagaimanapun juga UU Anti Perkosaan ini bisa dipakai untuk melindungi perempuan yang sering menjadi korban dalam kekerasan terutama sebagai korban perkosaan.<sup>35</sup>

UU anti perkosaan ini dikeluarkan pada tanggal 30 September 1997 yang memperluas pengertian perkosaan meliputi juga penyerangan

---

<sup>34</sup> . Ibid.h.34

<sup>35</sup> . Ibid.h.35

seksual dan perkosaan dalam perkawinan, serta ancaman hukuman yang dijatuhkan tidak tanggung-tanggung yaitu ancaman hukuman penjara atau hukuman mati. Pada saat penandatanganan UU tersebut, Presiden Fidel Ramos memberikan sambutannya dengan mengatakan bahwa perkosaan bukan lagi sekedar pelanggaran terhadap kehormatan umum namun sudah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sehingga tidak akan ada lagi wanita, istri atau suami yang melakukan hubungan suami-istri dluar keiklasan mereka masing-masing. Lebih lanjut Ramos mengatakan bahwa selama ini perkosaan selalu dihubungkan dengan keberadaan perempuan yang selalu takluk oleh pria di masyarakat kita.<sup>36</sup>

b. Lingkup Rumah tangga atau keluarga

Adapun yang disebut dengan rumah tangga atau keluarga tidak dicantumkan dalam UU anti perkosaan tahun 1997.

c. Sanksi

Berhubung undang-undang ini mengatur secara khusus tentang perkosaan, maka menarik untuk dikaji adalah adanya penghapusan unsur delik melalui cara perkawinan bagi perkosaan di luar perkawinan dan pemberian maaf pada perkosaan dalam keluarga. Disamping itu adanya:

---

<sup>36</sup> . Harian Republika, Tanggal 4 Oktober 1997.h.9

- hukuman seumur hidup sampai hukuman mati jika :a)menggunakan senjata atau penyertaan, b)korban hilang ingatan, c)percobaan perkosaan dan pembunuhan,
- hukuman mati dilaksanakan, jika :a) disertai pembunuhan, b)korban dibawah 18 tahun dan pelaku ada hubungan keluarga, c)jika korban dibawah perlindungan aparat, d)ada kehendak dari keluarga sampai derajat ketiga, e)korban anak berusia 7 tahun, f)pelaku terjangkit penyakit menular misalnya HIV dan lainnya, g)pelaku adalah anggota ABRI, Polisi atau penegak hukum, h)korban menderita cacat fisik permanen atau lumpuh, l)pelaku tahu jika korban hamil, j)pelaku tahu bahwa korban cacat mental atau cacat fisik.
- Hukuman pokok sampai penjara temporer, jika: a)pelaku menggunakan senjata atau ada penyertaan, b)korban menjadi hilang ingatan
- Hukuman penjara temporer, jika ada percobaan dan pembunuhan
- Hukuman seumur hidup, jika diikuti pembunuhan
- Hukuman penjara temporer dijatuhkan pada semua jenis delik tersebut
- Pengampunan, jika a)dilakukan perkawinan antara pelaku dengan korban, b)diberikan oleh istri.<sup>37</sup>

#### d. Perlindungan korban

Secara eksplisit perlindungan tidak diatur dalam undang-undang ini.

#### e. Kompensasi

Tidak diatur.

---

<sup>37</sup> . Ibid.h.36-37

#### 4. Turki

Undang-undang ini bernama Turkey Domestic Violence Law: Protection of The Family<sup>38</sup> atau Undang-undang tentang perlindungan terhadap keluarga.

##### a. Definisi Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur tersendiri, namun diatur dalam UU perlindungan terhadap keluarga.

Definisi kekerasan dalam rumah tangga secara eksplisit tidak didefinisikan ,

##### b. Lingkup Rumah tangga atau keluarga

UU ini mendefinisikan tentang subyek dari penyiksaan atau korban yang harus dilindungi antara lain, pasangan kawin, anak-anak atau anggota lain dalam keluarga yang hidup dalam satu atap.

##### c. Sanksi

Tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang ini.

##### d. Perlindungan korban

Kewajiban masyarakat untuk melindungi korban dari tindak kekerasan (penyiksaan) tidak diatur secara eksplisit. Namun demikian kewajiban negara diatur secara jelas dengan mewajibkan lembaga-lembaga seperti polisi, jaksa, dan hakim, sebagai berikut:

- Yang memberikan perintah perlindungan adalah hakim

---

<sup>38</sup> . [WWW.Turkey](http://WWW.Turkey) Domestic Violence Law: Protection of The Family, Yahoo.com

- Salinannya dipercayakan kepada penuntut umum (jaksa)
- Tidak diatur tentang tempat khusus untuk melindungi korban

Putusan hakim bisa berupa:<sup>39</sup>

- Tidak menggunakan kekerasan pada subyek;
- Meninggalkan tempat tinggal dan tidak berusaha mendekati tempat tinggalnya;
- Tidak merusak barang-barang;
- Tidak menyebabkan timbul rasa khawatir;
- Menyerahkan senjata pada polisi;
- Tidak datang ke tempat tinggal subyek dalam keadaan mabuk.

Apabila a sampai dengan f dilaksanakan tidak kurang dari 6 bulan, dilanggar maka "tergugat" (di Indonesia terdakwa) ditangkap dan ditahan.

#### e. Kompensasi

Dalam Undang-undang di Turki tidak secara eksplisit diatur tentang pemberian kompensasi bagi korban, namun demikian dicantumkan ketentuan bahwa "hakim menetapkan besarnya ganti rugi".

### 5. Malaysia

Undang-undang ini bernama Malaysia's Domestic Violence Act 521 (1994).<sup>40</sup> atau Akta tentang Keganasan Rumah Tangga.

#### a. Definisi Kekerasan

Definisi keganasan rumah tangga meliputi kekerasan terhadap psikis (ketakutan), fisik, memaksa atau mengancam.

---

<sup>39</sup> . Ibid.h.38

<sup>40</sup> . [WWW.Malaysia's Domestic Violence Act 521 \(1994\), Yahoo.com](http://WWW.Malaysia's Domestic Violence Act 521 (1994), Yahoo.com)

Keganasan rumah tangga (dalam bahasa Indonesia kekerasan dalam rumah tangga) adalah perbuatan:<sup>41</sup> (a).secara sengaja atau dengan disadari melakukan perbuatan atau mencoba melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban menjadi ketakutan atau terjadi secara fisik; (b).menyebabkan cedera fisik dengan sesuatu perbuatan yang diketahui atau sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fisik; (c).memaksa korban dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan perbuatan seksual atau lainnya.

b.Lingkup Rumah Tangga atau Keluarga

- i.istri atau suaminya;
- ii.bekas istri atau suaminya;
- iii.kanak-kanak
- iv.orang dewasa tak berkeupayaan, atau;
- v.nama-nama anggota lain keluarga.

c.Sanksi

Tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang.

d. Perlindungan Korban

Kewajiban masyarakat untuk melindungi korban tidak diatur secara eksplisit. Sedangkan kewajiban negara didelegasikan kepada Mahkamah Perlindungan Interim., yang melindungi korban, menjaga di tempat perlindungan, dan memberikan pengarahan, dll.

---

<sup>41</sup> . Op-cit.h.39

Macam-macam perlindungan yang dapat diperintahkan oleh Mahkamah diantaranya:

- Pengaturan hak penghunian terhadap orang yang dilindungi
- Melarang dan membatasi tindakan pelaku terhadap korban
- Membenarkan orang-orang yang dilindungi untuk bisa masuk ke tempat kediaman bersama
- Mengambil harta benda
- Memberikan pengarahan tentang hak dan kewajiban pelaku dan korban.

e. Kompensasi

Pemberian kompensasi sangat rinci sekali diantaranya adalah:<sup>42</sup>

- Kesakitan/penderitanya
- Biaya perawatan dan pengobatan
- Kehilangan pendapatan yang biasanya diperoleh
- Jumlah atau nilai harta benda yang diambil atau dimusnahkan atau dirusakkan
- Biaya yang diperlukan dan biaya orang-orang yang menjadi tanggung jawab korban apabila korban terpaksa pisah atau dipisahkan karena terjadinya KDRT, seperti:
  - a) Biaya penginapan ke tempat penyelamatan atau tempat perlindungan
  - b) Biaya pengangkutan dan pemindahan
  - c) Biaya yang seharusnya dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam seksi (3), boleh disebutkan jumlah yang merupakan pembayaran pinjaman perumahan atau pembayaran sewa atau sebagian daripadanya, berkenaan dengan kediaman bersama atau kediaman alternatif sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah secara adil.

---

<sup>42</sup> Ibid.43-44

Dengan membandingkan *domestic violence act* dari berbagai negara-negara tersebut patut diberikan catatan sebagai berikut:

- tidak satupun negara yang menunjuk atau mengkategorikan secara tegas jenis perbuatan yang bagaimana yang akan dijadikan sebagai tindak pidana, akan tetapi hanya menunjuk definisi dari kekerasan dalam rumah tangga.
- masalah sanksi ada negara yang memang mengaturnya secara tegas.
- masalah perlindungan bagi korban sebagian besar mengaturnya secara tegas.



**Perbandingan Peraturan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga ( Domestic Violence )  
Di Berbagai Negara**

Yang dibandingkan	Indonesia saat ini	Minnessota AS	New Zealand	Philipina	Turki	Malaysia	Konsep KUHP Yad.
	-KDRT tidak diatur secara khusus	- KDRT diatur tersendiri	- KDRT diatur tersendiri	- KDRT tidak diatur secara khusus, UU yg ada adalah UU Anti Perkosaan.	- KDRT tidak diatur tersendiri, namun diatur dalam UU Perlindungan terhadap keluarga.	- KDRT diatur tersendiri	Sebaiknya segera diatur
Definisi Kekerasan Dalam rumah tangga	definisi secara eksplisit tidak ada.	-meliputi kekerasan: 1)fisik,2)psikis dan 3) ancaman	meliputi kekerasan : 1)fisik,2)seksual, 3)psikis,4)intimidasi, 5)pelecehan,6)merusak harta benda, 7)ancaman.	-kekerasan terjadi bila ada : 1) Paksaan, 2)korban intimidasi, sadar,3) melalui mufakat jahat atau penyiksaan berat.	Kekerasan tidak didefinisikan secara eksplisit	Kekerasan terhadap : 1)psikis (ketakutan),2)fisik 3)memaksa atau mengancam.	Kekerasan terhadap: 1)Fisik,2)psikis, 3)seksual,4)Tekanan ekonomis.
Lingkup Rumah tangga atau keluarga	Definisi secara eksplisit tidak ada	Anggota rumah tangga: suami,istri,anak, orang yang mempunyai hubungan darah , hubungan-hubungan diluar nikah, cinta yang serius atau hubungan seksual.	Anggota rumah tangga : Suami,istri,anak,anggot a keluarga lain ,yang menurut kebiasaan merupakan bagian dari rumah tangga tersebut,mereka yang mempunyai hubungan dekat.	Tidak di cantumkan dalam UU anti Perkosaan tahun 1997.	Pasangan kawin,anak-anak atau anggota lain dalam keluarga yang hidup satu atap	Suami,istri,mantan istri/suami,anak-anak mereka anggota keluarga lain,orang dewasa yang tidak berdaya	Sebaiknya didefinisikan secara eksplisit: tentang siapa yang tinggal satu atap,yang pernah tinggal satu atap, kost,pembantu.
Sanksi	Belum diatur secara tegas.	Pidana minimum pembayaran denda ,pencabutan hak.	Tidak di atur secara tegas dalam UU ini.	Hukuman pokok	Tidak diatur secara tegas dalam UU ini.	Tidak diatur secara tegas dalam UU ini.	Sebaiknya diatur secara tegas.
Perlindungan korban : kewajiban negara	Kewajiban negara diatur dalam KUHP & KUHP :polisi,jaksa dan hakim.	-biaya dalam perintah perlindungan . -membantu pemohon memperoleh pelayanan perlindungan . -meminta tersangka membayar biaya perkara -melindungi alamat pemohon.	-kewajiban negara didelegasikan kepada pengadilan	-kewajiban negara tidak diatur dalam UU yang bersangkutan .	-kewajiban negara diatur secara jelas denga mewajibkan lembaga lembaga seperti polisi,jaksa dan hakim.	-kewajiban negara didelegasikan kepada mahkamah: melindungi korban,menjaga ditempat perlindungan,mem berikan pengarahan,dll.	-Sebaiknya diatur secara rinci, kewajiban negara melalui tugas oleh polisi,jaksa dan hakim.

Yang dibandingkan	Indonesia saat ini	Minnesota AS	New Zealand	Philipina	Turki	Malaysia	Konsep KUHP Yad.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-memerintahkan kepada polisi untuk memberikan bantuan perlindungan.</li> <li>-polisi dapat menahan tanpa surat perintah</li> </ul>					
Kewajiban masyarakat	-tidak diatur secara eksplisit	Tidak diatur secara eksplisit, hanya ada pengaturan tentang penanganan oleh layanan swasta jadi lebih merupakan peran serta masyarakat.	Tidak diatur secara eksplisit	-Tidak diatur secara eksplisit	Tidak diatur secara eksplisit.	Tidak diatur secara eksplisit	-sebaiknya diatur secara eksplisit

Yang dibandingkan	Indonesia saat ini	Minnesota AS	New Zealand	Philipina	Turki	Malaysia	Konsep KUHP Yad.
kompensasi	-ganti rugi dapat digugat menurut aturan umum yang ada	-pemberitahuan kepada pemohon tentang hakaknya untuk mendapat ganti rugi dari tersangka.	-ganti rugi kesakitan, biaya perawatan, harta yang di rusak, diambil, transportasi dan biaya-biaya lain yang timbul karenanya.	-tidak diatur	-tidak diatur secara eksplisit, hanya dicantumkan bahwa hakim menetapkan besarnya ganti rugi.	-dirinci mulai dari kesakitan / penderitaannya , biaya pengobatan, kehilangan pendapatan.	Sebaiknya diatur secara eksplisit.

**B.3.Konsep Dasar Yang Harus Diperhatikan Dalam Kebijakan  
Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah  
Tangga Dengan Hukum Pidana.**

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>43</sup>

**B.3.1. Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Merumuskan  
Perbuatan atau Tindak Pidana dan Perlindungan Hukum.**

Bertolak dari pendekatan kebijakan (mencakup kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum yang berkaitan secara integral), maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan perbuatan apa atau tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang bagaimana dijadikan tindak pidana adalah:

- a. Sosialisasi tentang penghapusan budaya patriarkhi, adat tradisi/keagamaan tentang perempuan.

---

<sup>43</sup> . Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996,h.30-31.

- b. Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang diskriminatif sifatnya yang ditujukan kepada perempuan, dan merupakan suatu perbuatan yang melanggar asas persamaan hak dan penghormatan pada martabat manusia.
- c. Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang spesifik sifatnya, karena adanya kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban , oleh karena itu penetapan/ pengaturan tentang delik kekerasan dalam rumah tangga harus dipertimbangkan secara seksama.
- d. Berkaitan dengan butir b di atas, maka pemilihan dan penetapan perbuatan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang akan diatur dan dijadikan delik harus dilakukan secara selektif dan limitatif, yaitu perbuatan/ tindak kekerasan yang benar-benar tidak dikehendaki, tidak disukai atau dibenci oleh korban serta perbuatan yang merugikan secara materiel dan spirituil. Selain itu harus pula dipertimbangkan sejauhmana perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental, kesucian yang berlaku dalam sebuah perkawinan.
- e. Kapasitas/ kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum di Indonesia dalam menegakkan ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah delik kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini harus

diprediksi bagaimana kondisi personil aparat penegak hukum baik secara kuantitatif maupun kualitatif misalnya menyangkut masalah pendidikan, tingkat profesionalisme, pengalamannya. Atau dapat dikatakan dilakukannya pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum (pengacara, jaksa, hakim, polisi) melalui diberikannya pengetahuan dan wawasan tentang gender.

- f. Perlu diperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka perlindungan korban, misalnya mendirikan rumah penampungan sementara atau shelter bagi para korban kekerasan.
- g. Akhirnya perlu pula dikaji akibat dari pengkriminalisasian dari tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, misalnya bagaimana pengaruh dari kriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap pelaku, korban, anak, dan anggota keluarga yang lain.

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan symposium itu antara lain menyatakan, untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan

- pelaku kejahatan itu sendiri seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
  4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.<sup>44</sup>

### B.3.2. Beberapa Hal Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Penetapan Sanksi Pidana.

Bertolak dari pendekatan nilai (meliputi nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) maka dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial, seperti:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat dan perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya lain yang tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini hal-hal yang perlu diperhitungkan berkaitan dari karakteristik yang bersifat khas dari tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah:
  - a. Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menyangkut sesuatu yang sangat peka/ sensitif sebab menyangkut nilai-nilai fundamental, kesucian dalam sebuah perkawinan, dan hal ini akan mengakibatkan dampak yang sangat

---

<sup>44</sup> . Ibid.h.32.

buruk bagi korban, seperti kehilangan rasa percaya diri, minder, trauma, dan lain-lain.

- b. Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga membuka kemungkinan bagi si pelaku untuk menjadi seorang penjahat besar dengan cara yang "aman", karena perbuatan tersebut kebanyakan dilakukan di dalam lingkup mereka (rumah), dan dalam hal ini jelas perbuatan tersebut dapat membahayakan jiwa manusia.
- c. Memasyarakatkan (sosialisasi) tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan.
- d. Memelihara/ mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai persamaan hak, keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu. Dalam hal ini hal-hal yang perlu diperhitungkan berkaitan dengan karakteristik yang bersifat khas dari tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu tidak selalu mengarah pada tujuan/maksud untuk menghilangkan nyawa korban, namun untuk memberikan pelajaran pada korban dari para pelakunya. Sekalipun perbuatan tersebut secara materi tidak merugikan namun dilihat dari aspek sosial, kultural perbuatan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai etika, moral.



Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan.<sup>45</sup>

Dengan pendekatan humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:<sup>46</sup>

- pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
- pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas atau tiada pidana tanpa kesalahan)
- pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti ada kelonggaran/ fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

#### **B.4. Beberapa Gagasan Pemikiran Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Domestic Violence).**

Undang-undang Nomor:7 tahun 1984 tentang Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam

---

<sup>45</sup> Ibid.h.41

<sup>46</sup> Ibid.h.43

pembukaan maupun dalam pasal-pasal nya menunjang untuk adanya suatu peraturan yang mengatur masalah-masalah yang timbul dalam suatu perkawinan terutama masalah kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa faktanya sekarang masalah kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak bermunculan tanpa bisa diselesaikan secara prosedur hukum karena belum adanya peraturan khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga yang jelas sebagai pelaku mayoritas laki-laki (suami) dan sebagai korban adalah wanita (istri). Sedangkan dampak kekerasan dalam rumah tangga jelas pada anak-anak dan keluarga lain yang hidup bersama dengan mereka.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 (1) Konvensi perempuan , perlu dilakukan berbagai upaya dan langkah tindak untuk mengubah sikap dan pola tingkah laku sosial budaya yang mengekalkan tindak kekerasan terhadap perempuan. Diperlukan *social engineering* yang efektif untuk dapat mengubah sikap dan pola tingkah laku seperti ini serta dikembangkannya budaya hukum, baik dikalangan aparat penegak hukum maupun di kalangan seluruh lapisan masyarakat <sup>47</sup>. Upaya dan langkah tindak itu merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, pemerintah (eksekutif), yudikatif termasuk aparat penegak

---

<sup>47</sup> . Soekanto, dalam Achie Sudiarti Luhulima dan Kunthi Tridewiyanti, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Op-cit, h.143.

hukum, legislatif, serta masyarakat umum, laki-laki dan perempuan,

Upaya dan langkah tindak itu dapat berupa antara lain:<sup>48</sup>

- Sesuai dengan anjuran Rekomendasi Umum No.19 CEDAW, dikembangkan dan dilaksanakan pendidikan program informasi bagi masyarakat untuk menghapus prasangka dan praktek-praktek tradisional yang mengekalkan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu bagian dari program informasi itu ialah kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kedudukan serta peran yang setara dalam keluarga dan dalam masyarakat.
- Lebih banyak dilakukan penelitian yang mengidentifikasi sifat dan luasnya sikap, kebiasaan dan praktik serta jenis kekerasan yang merupakan akibat dari sikap-sikap itu. Juga dilakukan identifikasi upaya dan langkah tindak yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Hasil penelitian itu dipergunakan dalam perumusan kebijakan serta langkah tindak pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Membangun budaya hukum dan kesadaran hukum di kalangan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan, pelaksana hukum dan memberikan perlindungan hukum. Di kalangan yudikatif termasuk aparat penegak hukum, serta legislatif yang dapat mengambil inisiatif dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang adil dan non-diskriminatif terhadap perempuan, serta masyarakat pada umumnya. LSM, organisasi politik, media masa, akademika, dapat bertindak sebagai kontrol sosial.
- Dalam membangun budaya hukum termasuk pula menciptakan peraturan perundang-undangan baru serta mengubah yang ada yang sudah tidak sesuai. Akan tetapi yang lebih penting ialah perubahan sikap para penegak hukum dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan sikap sadar dan peka jender, dan dengan demikian dapat lebih berpihak pada perempuan dan memberikan keadilan pada para korban kekerasan.
- Memberikan bantuan kepada perempuan untuk berani dan mau melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada polisi sebagai langkah pertama pelaporan dan penyelidikan, dan mendapatkan perlindungan. Korban perlu diberikan bantuan untuk mendapatkan penanganan medis dan psikologis. Bantuan

---

<sup>48</sup> . Ibid.h.143

dapat diberikan antara lain oleh *women's crisis center*. Bantuan perlu pula diberikan pada perempuan korban kekerasan dalam proses peradilan untuk mendapatkan keadilan.

Strategi pencegahan dan penanggulangan menurut Nursyahbani Katjasungkana, jika kita berbicara mengenai sistem hukum, maka ada tiga komponen yang harus diperhatikan didalamnya yakni isi/rumusan hukumnya (*legal substance*), aparat hukum/kelembagaan (*legal structure*), serta kultur/ kebiasaan (*legal culture*) yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga perubahan pada komponen yang satu akan berpengaruh pada komponen lainnya. Di samping itu upaya-upaya yang bersifat pelayanan seperti misalnya pendirian *women's crisis center* atau rumah penampungan (*shelter*) adalah sesuatu yang niscaya harus dilakukan pula.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Muladi, permasalahan kekerasan terhadap wanita merupakan masalah interdisipliner, baik politis, sosial, budaya, ekonomis maupun aspek-aspek sosial lain. Atas kajian-kajian lintas cultural misalnya saja dapat diprediksi bahwa kekerasan akan banyak terjadi dimana ada kesenjangan ekonomis antara laki-laki dan wanita, penyelesaian konflik dengan kekerasan, dominasi laki-laki dan ekonomi

---

<sup>49</sup> . Nursyahbani Katjasungkana, *Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Nursyahbani (ed), *Potret Perempuan*, Kerjasama PSW UMY dengan Pustaka Pelajar, 2001.h.116-117.

keluarga serta pengambilan keputusan yang berbasis pada laki-laki. Sebaliknya dalam kondisi-kondisi dimana perempuan mempunyai kekuasaan di luar rumah, intervensi masyarakat secara aktif dan berkembangnya perlindungan sosial, keluarga, dan kawan terhadap kekerasan, prediksi terjadinya kekerasan sangat rendah. Dari tukar pengalaman peribagai negara tentang strategi penanggulangan kekerasan terhadap wanita, pada dasarnya hal ini mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>50</sup>

- (1). Peningkatan kesadaran wanita terhadap hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (*legal training*). Pendidikan sebagai sarana pemberdayaan wanita dilakukan dalam tema yang univarsa (*universal education for women*).
- (2). Peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap wanita, baik dalam konteks individual, sosial maupun institusional.
- (3). Mengingat masalah kekerasan terhadap wanita sudah merupakan issue global, maka perlu koordinasi antar negara untuk melakukan kerjasama penanggulangan.
- (4). Meningkatkan kesadaran para penegak hukum, agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap wanita, dalam satu spirit bahwa masalahnya telah bergeser menjadi masalah global (*police sensitization*).
- (5). Peningkatan bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap wanita (*support and counselling*).
- (6). Peningkatan kesadaran masyarakat secara nasional dengan kampanye yang sistematis didukung jaringan yang mantab (*national public awareness campaigns and networking*).
- (7). Meningkatkan peranan mass media.
- (8). Perbaikan sistem peradilan pidana, dimulai dari pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.
- (9). Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif untuk penanggulangan kekerasan terhadap wanita.

---

<sup>50</sup> . Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.h.37-38.

- (10). Secara terpadu meningkatkan program pembinaan korban dan pelaku.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka berikut ini penulis akan mencoba untuk menguraikan beberapa gagasan pemikiran tentang pengaturan untuk menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) di masa mendatang, sebagai berikut:

Dikaitkan dengan sejarah hukum pidana kita, kita harus menoleh pula pada model yang dibangun atas dasar hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*) yang mendasarkan diri pada konsep *equal justice*. Kita juga sulit untuk menerima warisan aliran modern yang bertumpu pada konsep *daderstrafrecht* yang memberi penekanan pada pelaku tindak pidana. Yang kita anut mestinya adalah model yang realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep *daad-daderstrafrecht* ini saya sebut sebagai model keseimbangan kepentingan.<sup>51</sup>

Oleh karena itu dalam melakukan kebijakan kriminalisasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga nantinya seyogyanya dicantumkan secara tegas perumusan deliknya karena hal

---

<sup>51</sup> . Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cetakan ke II Tahun 2002.h.5

ini sudah menjadi persyaratan dan konsekuensi diakuinya konsep *mono-dualistik* dalam hukum pidana yang diartikan memperhatikan keseimbangan dua kepentingan yaitu antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, hal ini nampak dari karakteristik hukum pidana yang memperhatikan *segi obyektif dari perbuatan (daad)* dan juga *segi-segi subyektif dari orang/pelaku (dader)* atau lebih dikenal dengan prinsip *Daad dader Strafrecht*.

Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan *mono-dualistik*, maka selayaknya tetap mempertahankan dua asas yang sangat fundamental yaitu asas *Legalitas* (yang merupakan "asas kemasyarakatan" ) dan asas Kesalahan/ asas *Culpabilitas* (yang merupakan "asas kemanusiaan" ). Asas legalitas sebagai asas yang fundamental ini bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan penguasa dan ketidak pastian hukum, disamping itu asas ini secara psikologis mempunyai sifat *crime prevention*. Dengan demikian maka dalam melakukan kebijakan kriminal nantinya harus mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam asas legalitas yaitu tertulis yang mempunyai makna harus tegas perumusannya, berprespektif sehingga tidak menimbulkan ambivalensi dalam penafsiran (analogi).

Namun demikian mengingat potensi keragaman nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada masyarakat Indonesia, maka penggunaan asas legalitas sebagaimana dianut dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP ,

nantinya tidak dapat sepenuhnya diikuti, hal ini juga terlihat pada rumusan Konsep KUHP tahun 1999/2000 dalam Pasal 1 ayat 3 yang memberikan pengakuan pada "hukum yang hidup" (hukum tidak tertulis/ hukum adat) sebagai dasar patut dipidanya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada padanannya dalam KUHP. Perluasan rumusan asas legalitas ini tidak dapat dilepasan dari usaha untuk mewujudkan dan sekaligus menjamin asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian maka rumusan delik tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga nantinya tidak hanya merumuskan secara tegas perbuatan-perbuatan mana yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana namun juga memberikan ruang gerak bagi perbuatan-perbuatan yang menurut nilai-nilai dan norma-norma yang dianut atau yang berlaku dalam masyarakat merupakan suatu perbuatan yang tercela, dan dapat dikategorikan ke dalam delik tersebut.

#### a. Perumusan Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah:

"Penganiayaan, perkosaan, pelecehan, ancaman, pemaksaan".

Terhadap perempuan dalam rumah tangga.



Sedangkan lingkup rumah tangga atau keluarga hendaknya didefinisikan secara eksplisit tentang siapa yang tinggal satu atap, yang pernah tinggal satu atap.

b. Sanksi

Berkaitan dengan sifat dari tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang bersifat khusus, kompleks dan khas, maka setidaknya ada dua hal yang harus dikaji yaitu:

- 1.jenis sanksi pidana (aspek kualitas)
- 2.bobot pidana (aspek kuantitas)

Penetapan jenis sanksi pidana yang terdiri atas pidana (pokok dan tambahan), tindakan dalam Konsep KUHP, penulis pandang sudah tepat untuk mengatasi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, demikian juga dalam penentuan bobot pidana dengan catatan:

- Pidana penjara dan denda ada yang dirumuskan ancaman minimumnya
- Pidana denda dirumuskan dengan sistem kategori
- Ada pedoman untuk menerapkan pidana yang dirumuskan secara tunggal dan alternatif yang memberi kemungkinan perumusan tunggal diterapkan secara alternatif dan perumusan alternatif diterapkan secara kumulatif.

### 3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebaiknya diatur secara eksplisit antara kewajiban masyarakat dan negara.

- Kewajiban masyarakat

Maksudnya disini adalah kewajiban masyarakat atau orang yang terdekat dengan korban yang melihat, menyaksikan, mendengar terjadinya kekerasan untuk segera memberikan perlindungan dan melapor kepada yang berwajib.

- Kewajiban negara:

- Kewajiban negara hendaknya didelegasikan kepada polisi, hakim, jaksa, dan pengadilan.

- mendirikan pusat-pusat medis baik untuk penyembuhan fisik maupun psikis, pusat-pusat bantuan (Crisis Center).

- kompensasi, kerugian dan penderitaan korban akibat kekerasan dalam rumah tangga adalah tanggung jawab pelaku. Hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian bias diperoleh baik dari pemerintah yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban. Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHP tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang

berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Dalam kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga jelas ketentuan ini jauh dari memadai, apalagi karena kerugian yang dialami sulit diukur dengan materi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan hukum pidana saat ini dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dalam lingkup kebijakan yang menyangkut masalah perbuatan atau tindak pidana, sanksi dan perlindungan korban bersifat aplikatif yaitu dengan mengoperasionalisasikan ketentuan yang terdapat dalam KUHP , sehingga dalam penerapannya belum optimal, kesimpulan ini didasarkan pada hasil kajian berikut:
  - a. Kasus-kasus yang terjadi selama ini ternyata dalam prakteknya/ pelaksanaan di lapangan menunjukkan rendahnya sanksi pidana bagi pelaku, dan tidak adanya perlindungan hukum bagi korban kekerasan (perempuan dalam rumah tangga).

- b. Berkaitan dengan pernyataan dari point a di atas, apabila dianalisa hal ini karena disebabkan kurang tepatnya penafsiran (interpretasi) dari pasal-pasal yang diterapkan selama ini, atau dapat juga dikatakan bahwa operasionalisasi pasal-pasal dalam KUHP saat ini belum optimal.
- c. Sampai saat ini hukum positif di Indonesia belum secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang merespon persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) mulai dari adanya perbuatan atau tindak pidana, sanksi maupun perlindungan korban terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

2. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) di masa mendatang sebaiknya harus segera diupayakan, sebab pasal-pasal yang dipakai saat ini semakin tidak relevan untuk diterapkan lagi. Hal ini perlu diantisipasi dengan pemikiran-pemikiran untuk mengupayakan penanggulangannya melalui kebijakan hukum pidana yang menitik beratkan pada aspek formulasinya, yakni upaya untuk merancang rumusan perbuatan atau tindak pidana, sanksi dan perlindungan

korban, yang bersifat kompleks, dan khusus. Berdasarkan hasil kajian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Konsep KUHP 1999/2000 ternyata belum optimal apabila diterapkan guna menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*).
- b. Gambaran kebijakan hukum pidana di berbagai negara asing bisa digunakan sebagai perbandingan hukumnya.
- c. Guna mendukung terwujudnya kebijakan hukum pidana di masa mendatang, maka ada konsep-konsep dasar yang harus diperhatikan dalam membuat kebijakan yang menyangkut perbuatan atau tindak pidana, sanksi, dan perlindungan hukum.
- d. Disamping itu juga sangat diperlukan beberapa gagasan pemikiran dalam pembuatan kebijakan di masa mendatang

## **B.Saran**

Selanjutnya dengan mengacu pada simpulan yang merupakan jawaban permasalahan tersebut di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Segera diadakan pembaharuan perundang-undangan yang ada (KUHP) yang nantinya akan lebih aspiratif, responsif dan akomodatif dan tepat sasaran dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga

(*domestic violence*) dari segi: perbuatan atau tindak pidana, sanksi, maupun perlindungan korban.

- b. Perumusan delik harus jelas dan lengkap, sehingga tidak menimbulkan penafsiran (interpretasi) yang kurang tepat di lapangan, hal ini bisa dilakukan dengan membandingkan atau melihat perundang-undangan kita saat ini dengan Konsep KUHP, Peraturan perundang-undangan dari Negara-negara Asing yang telah mempunyai *Domestic Violence Act*, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang sudah diratifikasi maupun yang belum.

## DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Bandung, 1984

-----, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Victimologi*, dalam Suparman Marzuki (ed), *Pelecehan Seksual Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Fakultas Hukum UII, 1995

Chusairi, Achmad, *Menggugat Harmoni*, Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 2000

Dirjosisworo, Soejono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993.

-----, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1997.

Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990.

Fakih, Mansour, *Perubahan Sosial Perspektif Gender*, Lokakarya "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Rancangan KUHP", diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum UGM dan LBH APIK, Yogyakarta 11-13 Maret 1999.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993

Ihromi, Tapi Omas, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (penyunting), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.



Ihromi, Tapi Omas, Sulistyowati Irianto dan Achi Sudiarti Luhulima (penyunting), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap wanita*, Alumni Bandung, 2000.

Hamzah, Andi, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, 1995.

H.A.K Mochammad Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP BUKU II*, Jilid I, Alumni Bandung, 1986.

Harkrisnowo, Harkristuti, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, Makalah, [WWW.Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan @ Yahoo.com](http://WWW.TindakKekerasanTerhadapPerempuan@yahoo.com).

-----, *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Makalah pada SEMILOK, Tindak Kekerasan Terhadap Wanita, yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI), Jakarta, 15 September 1992.

-----, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dari segi kriminologi dan hukum)*, Makalah yang disampaikan pada penataran Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan di UNDIP Semarang, 23-30 November 1998.

Hariti Chatarina Puramdani (ed), *Perubahan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan, Jakarta, 1999.

Hudioro, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan di Wilayah Perkotaan*, Makalah dalam Seminar Kriminologi FISIP UI, 29 Nopember 1984.

Kartini, Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981.

Katjasungkana, Nursyahbani, dkk, *Potret Perempuan*, Kerjasama PSW UMY Yogyakarta dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

Kusumah, Mulyana, W, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

- Luhulima, Achie Sudiarti (ed), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender Bekerja sama dengan Kedutaan Besar Selandia Baru, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1987.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- , *Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan*, dalam Suparman Marzuki (ed), *Perempuan Dalam wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, 1997.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Munti, Ratna Batara, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft RUU Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK, Jakarta, 2000.
- Nawawi, Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1996.
- , *Kejahatan Seksual dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik Kriminal*, dalam Suparman Marzuki (ed), *Pelecehan Seksual Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Fakultas Hukum Ull, Yogyakarta, 1995.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Nasution, S, dan M.Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Notopuro, Harjito, *Peranan Wanita dalam Masa Pembangunan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1979.
- Prasetio, Eko dan Suparman Marzuki (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, 1997.
- Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Istri*, Rifka Annisa WCC, Yogyakarta, 1999.
- Simorangkir, J.C.T, Rudy T Erwin dan J.T.Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2000.
- Situmorang, Victor, *Kedudukan Wanita dimata Hukum*, Bina Aksara, jakarta, 1988.
- Soesilo, R. *Kriminologi*, Politea, Bogor, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.

-----, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Susanto, I.S, *Kajian Kriminologis Kekerasan Terhadap Wanita*, dalam Suparman Marzuki (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, 2000.

Supriadi, Wila Chandrawila, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya, 1981.

Tumbusaraswati, *Kejahatan yang dilakukan oleh perempuan* Makalah Seminar Kriminologi ke VII, Semarang, 1-2 Desember 1994.

Triningtyasasih, *Pengalaman Sebuah Woman's Crisis Center*, dalam Natalie Kollman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kerjasama YLKI dan Ford Foundation, 1998.

Wisnubroto, Aloysius, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999

WWW.Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

WWW.United Nations

WWWHAM Wanita

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Jurnal Perempuan Vol.01 Agustus/September 1996.

Jurnal Perempuan Edisi 09 November 1998-Januari 1999.

Jurnal, *Perempuan Menuntut Keadilan*, Mitra Perempuan, Jakarta, 2000.

Rancangan Undang-undang Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan  
dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*).

Rancangan Konsep KUHP, 1999/2000.

Tabloid Nova, No.737/XV-14 April 2002.

Suara APIK, Edisi 13 Tahun 2000, LBH APIK, Jakarta.

Harian Kompas 16 Desember 2001.